LAPORAN KINERJA 2025

BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA
BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN
TAHUN 2025

Situbondo, 15 Januari 2026

Kepala Balai
Taman Nasional Baluran

AGUS SETYABUDI,S.Hut,.M.Sc
NIP. 19820814 200604 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Taman Nasional Baluran selama Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025–2029 serta tahun transisi kelembagaan kementerian. Dalam dinamika tersebut, Balai Taman Nasional Baluran tetap berkomitmen melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai sarana evaluasi internal atas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai media transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

Secara umum, capaian kinerja Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Seluruh indikator kinerja kegiatan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan sebagian indikator menunjukkan capaian melampaui target. Capaian tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP dan kinerja Balai Taman Nasional Baluran pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai Taman Nasional Baluran serta dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi di masa yang akan datang.

Situbondo, Januari 2025
Kepala Balai TN Baluran

Agus Setyabudi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan konservasi selama Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini menjadi instrumen utama dalam mengukur capaian kinerja berbasis hasil (outcome based performance) serta sarana evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Taman Nasional Baluran dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Tahun 2025 merupakan periode strategis karena menandai transisi kelembagaan kementerian serta tahun pertama implementasi Rencana Strategis (Renstra) Balai TN Baluran 2025–2029. Dalam konteks tersebut, kinerja Balai TN Baluran tidak hanya dinilai dari aspek realisasi program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta merespons tantangan konservasi yang semakin kompleks di tingkat tapak.

Secara umum, kinerja Balai TN Baluran Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik (Nilai Capaian Kinerja sebesar 122,51%). Seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan berhasil dicapai, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang ditetapkan. Pada aspek konservasi sumber daya alam dan ekosistem, Balai TN Baluran berhasil melakukan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain :

1. **Jumlah Spesies yang Terdata Sebaran dan/atau Populasinya.** Target Tahun 2025 yaitu 5 spesies dengan Realisasi: 5 spesies dan tingkat capaian: 100%. Capaian indikator menunjukkan terpenuhinya target pendataan spesies prioritas dan hasil kegiatan mendukung penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati sebagai dasar pengelolaan kawasan.
2. **Jumlah Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel.** Target Tahun 2025 yaitu 10% dengan Realisasi: 92% dari total entitas kerja sama aktif dan tingkat capaian indikator: 150%. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator tata kelola kerja sama dan capaian menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan kerja sama.
3. **Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB.** Target Tahun 2025 yaitu 200 Hektar dengan Realisasi: 337,74 Hektar dan tingkat capaian indikator: 150%. Capaian ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem daratan di kawasan Taman Nasional Baluran melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

4. **Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif.** Target Tahun 2025 yaitu 1 Unit dengan Realisasi: 1 Unit dan tingkat capaian indikator: 100%. Menunjukkan capaian sesuai target, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui penerapan standar pengelolaan yang terukur dan berkelanjutan.
5. **Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati.** Target Tahun 2025 yaitu 3 Kelompok Masyarakat dengan Realisasi: 3 Kelompok Masyarakat dan tingkat capaian indikator: 100%. Menunjukkan efektivitas pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.
6. **Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA dan TB.** Target Tahun 2025 yaitu 3,35 Milyar dengan Realisasi: 5,02 Milyar dan tingkat capaian indikator: 150%. Mencerminkan optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan yang tetap memperhatikan prinsip kelestarian kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment.** Target Tahun 2025 yaitu 10 Persen dengan Realisasi: 100% dan tingkat capaian indikator: 150%. Menjadi fondasi awal dalam pengembangan layanan wisata alam berbasis digital secara berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi..

Pada aspek perencanaan, Balai TN Baluran berhasil mencatat capaian IKK

8. **Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB.** Target Tahun 2025 yaitu 0,57 poin dengan Realisasi: 0,69 poin dan tingkat capaian: 121%. Capaian indikator menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan kawasan serta efektivitas perencanaan berada pada kategori cukup efektif.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Balai TN Baluran menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

9. **Nilai Maturitas SPIP Balai Taman Nasional Baluran.** Target Tahun 2025 yaitu 3,90 poin dengan Realisasi: 4,06 poin dan tingkat capaian: 104,10%. Capaian indikator menggambarkan bahwa sistem manajemen kinerja dan pengendalian internal telah terbangun dengan baik dan terintegrasi dalam proses bisnis organisasi.
10. **Nilai SAKIP Balai Taman Nasional Baluran.** Target Tahun 2025 yaitu 89,13 poin dengan Realisasi: 89,15 poin dan tingkat capaian: 100,02%. Capaian indikator menggambarkan bahwa Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) juga dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, didukung oleh penyusunan laporan keuangan yang andal.

Dalam pengelolaan anggaran, Balai TN Baluran memperoleh pagu akhir sebesar Rp14.804.452.000,- setelah melalui dinamika revisi anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan secara proporsional untuk mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Analisis efisiensi menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara efektif dan memberikan hasil yang sepadan dengan capaian kinerja.

Capaian kinerja Tahun 2025 juga didukung oleh penguatan kemitraan konservasi, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan mitra strategis, yang tidak hanya berkontribusi terhadap keberhasilan program konservasi, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Balai Taman Nasional Baluran berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Capaian tahun ini menjadi baseline penting bagi pelaksanaan Renstra 2025–2029 serta landasan strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, tata kelola pemerintahan, dan kontribusi nyata terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Daftar Isi

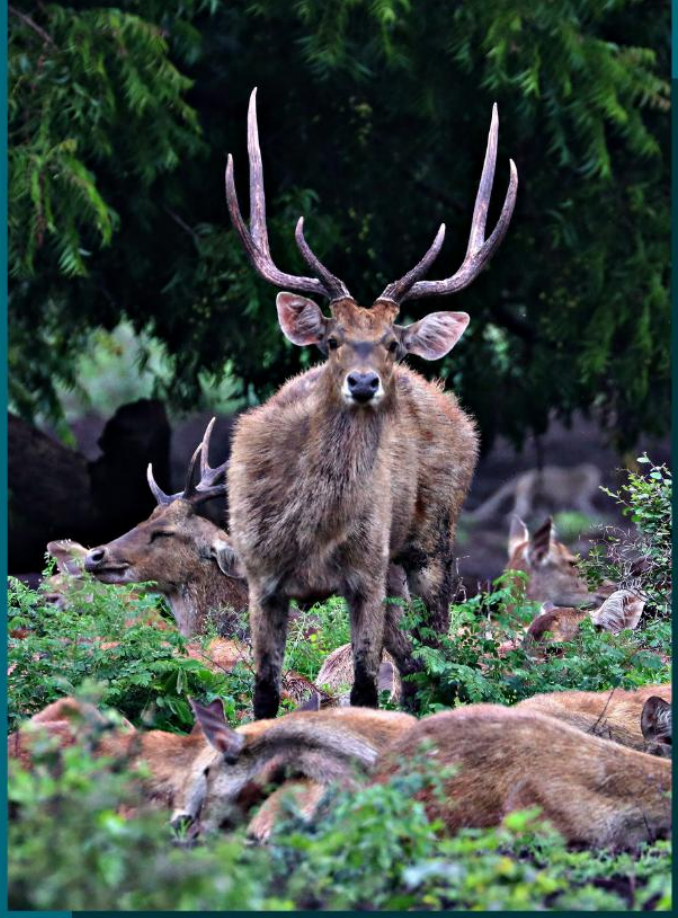

PENDAHULUAN 01

STRUKTUR ORGANISASI 03

TUGAS DAN FUNGSI 03

SUMBER DAYA MANUSIA 06

PERENCANAAN KINERJA 08

RENCANA STRATEGIS (2025-2029) 09

RENCANA KERJA 2025 10

PERJANJIAN KINERJA 2025 11

PERJALANAN PAGU 12

POHON KINERJA 13

AKUNTABILITAS KINERJA 15

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 17

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN 94

CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL 96

CAPAIAN SDGs 97

PENUTUP 98

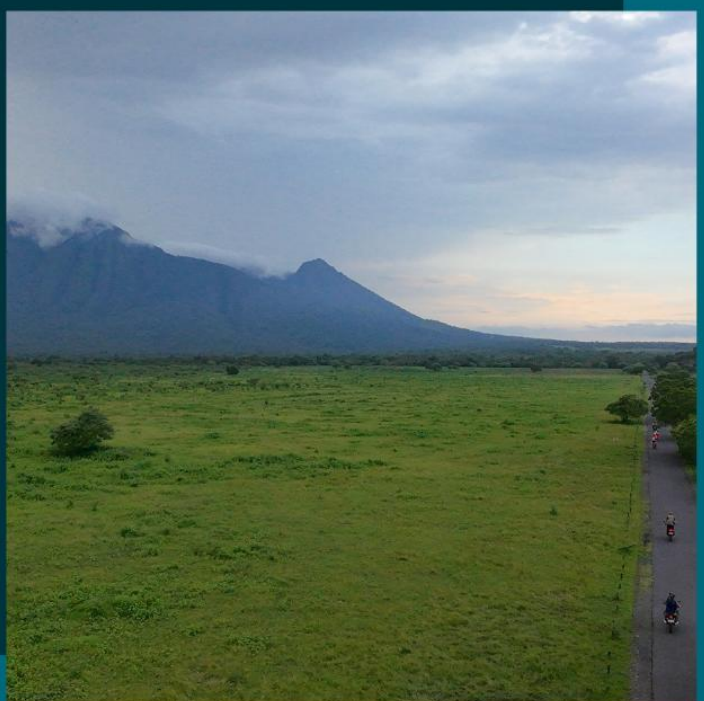

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Baluran 3
Gambar 2. Grafik kondisi SDM Balai Taman Nasional Baluran tahun 2025 6
Gambar 3. Grafik perjalanan pagu Balai TN Baluran tahun 2025 13
Gambar 4. Data Estimasi Populasi 5 Satwa Target tahun 2025.....19
Gambar 5. Target Nilai Jumlah spesies yang terdata sebaran tahun 2025 - 2029 21
Gambar 6. Pemasangan Camera trap dalam rangka Inventarisasi Populasi Satwa ...22
Gambar 7. Seekor Banteng jantan terpantau sedang minum di kubangan 25
Gambar 8. Nilai Indeks Efektifitas Perencanaan Balai TN Baluran 26
Gambar 9. Sosialisasi Program Kerja Balai TN Baluran dengan Bupati Situbondo 27
Gambar 10. Nilai Indeks Efektifitas Perencanaan Balai TN Baluran 28
Gambar 11. Grafik target Indeks Efektifitas Perencanaan tahun 2025 – 2029 29
Gambar 12. Target Nilai Maturitas SPIP tahun 2025 - 2029 35
Gambar 13. Target IKK Persentase entitas kerja sama 36
Gambar 14. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja sama 36
Gambar 15. Fasilitas Visitor Center 37
Gambar 16. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan oleh mitra 40
Gambar 17. Target Pemuihan Ekosistem Tahun 2025-2029 43
Gambar 18. Eradikasi tanaman invasif Vachelia nilotica 44
Gambar 19. Savana prioritas pasca dilakukan pemeliharaan 47
Gambar 20. Data cakupan wilayah Smart Patrol di TN baluran tahun 2025 49
Gambar 21. Data kebakaran hutan di TN baluran tahun 2025 50
Gambar 22. Nilai METT Balai TN Baluran 51
Gambar 23. Target Nilai Maturitas SPIP tahun 2025 - 2029 52
Gambar 24. Pemadaman kebakaran hutan di Savana 52
Gambar 25. Pemeriksaan terhadap aktivitas masyarakat di dalam kawasan 54
Gambar 26. Patroli pengamanan bersama stakeholder terkait 56
Gambar 27. Pendampingan Kelompok Masyarakat Mitra Ternak Baluran 57
Gambar 28. Grafik target Jumlah Pokmas yang Dibina tahun 2025 - 2029 59
Gambar 29. Pendampingan Kelompok Masyarakat Banteng Afrika 59

Gambar 30. Pelantikan Anggota Baru Saka Wanabakti 63
Gambar 31. Pendampingan Kelompok Masyarakat Wahana Raya merak Baluran...64
Gambar 32. Grafik jumlah Pengunjung bulanan 66
Gambar 33. Grafik target PNBP tahun 2025 - 2029 67
Gambar 34. Grafik perbandingan realisasi PNBP tahun 2024 – 2025.....68
Gambar 35. Salah satu aktivitas wisata alam di Taman Nasional Baluran 69
Gambar 36. Penyegaran Pemandu Wisata Alam Taman Nasional Baluran 71
Gambar 37. Pembayaran tiket masuk dengan menggunakan QRis 75
Gambar 38. Target IKK Eticketing dan Cashless payment tahun 2025 - 2029.....77
Gambar 39. Dashboard aplikasi eticketing Sobat Banteng 79
Gambar 40. Sosialisasi penerapan Cashless payment di media sosial.....81
Gambar 41. Target Nilai Maturitas SPIP tahun 2025 - 2029 84
Gambar 42. Rapat Pembahasan Pelaksanaan SPIP di Balai TN Baluran 85
Gambar 43. Evaluasi Dalam Rangka Pencapaian Target Kegiatan.....89
Gambar 44. Evaluasi Dalam Rangka Pencapaian Target Kegiatan.....89
Gambar 45. Grafik target Nilai SAKIP tahun 2025 - 2029.....90
Gambar 46. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan lingkup BTN Baluran 93
Gambar 47. Pembinaan Pegawai Melalui Upacara Peringatan Hari Besar Nasional 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persebaran ASN Lingkup BTN Baluran 3
Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BTN Baluran 2025-2029 10
Tabel 3. Rekap IKK Balai TN Baluran Tahun 2025 17
Tabel 4. Capaian Pemuihan Ekosistem di Taman Nasional Baluran 42
Tabel 5. Jumlah PNBP Balai TN Baluran per bulan 66
Tabel 6. Grafik target Nilai SAKIP tahun 2025 - 2029 91

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dokumen ini menjadi instrumen penting untuk mengomunikasikan capaian kinerja organisasi kepada pemangku kepentingan, sekaligus sebagai bahan evaluasi atas komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Tahun 2025 menjadi periode yang krusial bagi Balai TN Baluran, mengingat adanya transisi kelembagaan kementerian serta dimulainya siklus perencanaan baru melalui Renstra 2025-2029. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menyajikan angka realisasi, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas strategi pengelolaan kawasan dalam menghadapi tantangan konservasi yang semakin kompleks di tingkat tapak.

Penyusunan dokumen LKj Tahun 2025 merupakan wujud dukungan terhadap capaian program strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) pada Kementerian Kehutanan sepanjang tahun anggaran 2025. Laporan ini disusun dengan tujuan utama untuk menyajikan capaian riil serta realisasi kinerja Balai TN Baluran secara transparan dan akuntabel. Seluruh pemaparan kinerja dalam dokumen ini didasarkan pada target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Balai Taman Nasional Baluran dengan Direktur Jenderal KSDAE.

STRUKTUR ORGANISASI

Balai Taman Nasional (TN) Baluran merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tipe B di bawah Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan. Organisasi ini dipimpin oleh Kepala Balai (Pejabat Administrator) yang membawahi struktur sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha: Dipimpin oleh Pejabat Pengawas yang mengoordinasikan empat Tim Kerja: Perencanaan dan Evaluasi; Data, Informasi, Kehumasan dan Kerja Sama; Keuangan, SDM, dan Persuratan; serta BMN dan Kerumahtanggaan.
b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah: Terdiri atas SPTN Wilayah I Bekol dan SPTN Wilayah II Karangtekok, yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat Pengawas.
c. Kelompok Jabatan Fungsional Madya: Memberikan dukungan teknis dan supervisi strategis langsung di bawah garis komando Kepala Balai.

d. Resor: Sebagai unit pengelola terkecil, terdapat 3 Resor di bawah SPTN Wilayah I (Perengan, Bama, Balanan) dan 4 Resor di bawah SPTN Wilayah II (Bajulmati, Bitakol, Watunumpuk, Labuhan Merak).

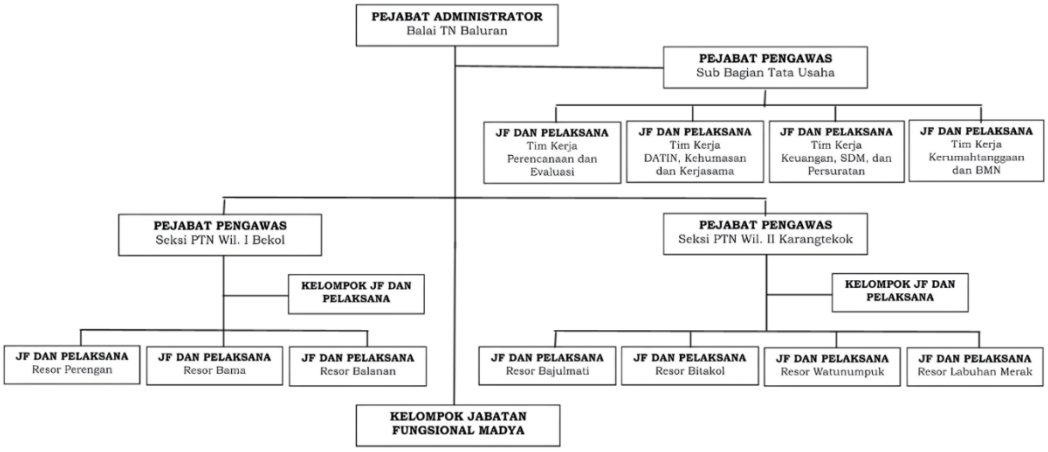

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Baluran

Terlampir distribusi pegawai Berdasarkan SK.33 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Kerja, Kedudukan, Penugasan, Penyesuaian dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana Lingkup Balai Taman Nasional Baluran.

Tabel 1. Persebaran ASN Lingkup BTN Baluran

BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN		**100**
Balai		**28**
1.	Kepala Balai Taman Nasional	**1**
Jabatan Fungsional Teknis Madya		
1.	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya	**2**
2.	Polisi Hutan Ahli Madya	**1**
Sub Bagian Tata Usaha		
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	**1**
Kelompok Tim Kerja		
1.	Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi	**4**
2.	Tim Kerja Data, Informasi, Kehumasan dan Kerjasama	**6**
3.	Tim Kerja Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Persuratan	**5**
4.	Tim Kerja barang Milik Negara dan Kerumahtanggan	**8**
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I		**35**
1.	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I	**1**
2.	Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana	**1**
3.	Anggota Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana	**15**
Resor Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I		
1.	Resor Pengelolaan Taman Nasional Perengan	**7**

2.	Resor Pengelolaan Taman Nasional Bama	**5**
3.	Resor Pengelolaan Taman Nasional Balanan	**6**
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II		**35**
1.	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II	**1**
2.	Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana	**1**
3.	Anggota Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana	**6**
Resor Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II		
1.	Resor Pengelolaan Taman Nasional Bajulmati	**9**
2.	Resor Pengelolaan Taman Nasional Bitakol	**7**
3.	Resor Pengelolaan Taman Nasional Watunumpuk	**8**
4.	Resor Pengelolaan Taman Nasional Labuhan Merak	**5**

TUGAS DAN FUNGSI

Guna menjamin efektivitas tata kelola organisasi yang telah terstruktur tersebut, Balai TN Baluran mengintegrasikan peran seluruh unit kerja dan tim kerja dalam mencapai tujuan strategis kementerian. Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan konservasi tersebut, Balai menyelenggarakan berbagai fungsi utama berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, antara lain:

a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional;

b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
e. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional;
f. pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
g. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/ atau karbon di taman nasional;
h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan taman nasional;
i. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional;
j. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional;
k. pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di taman nasional;
l. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional;
m. pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
n. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
o. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional;
p. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional; dan
q. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan pelaksanaan berbagai fungsi pengelolaan konservasi tersebut sangat bergantung pada ketersediaan personel sebagai penggerak utama organisasi pada Kementerian Kehutanan. Guna menjamin kelancaran tugas tersebut, Balai TN Baluran didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, dengan rincian sebagai berikut:

Hingga akhir Desember 2025, kekuatan SDM Balai TN Baluran terdiri 100 ASN dengan komposisi 51 PNS dan 49 PPPK. Selaras dengan penataan organisasi terbaru, jenjang karir di Balai TN Baluran diklasifikasikan ke dalam jabatan manajerial (struktural/non-struktural) dan jabatan fungsional yang bekerja secara kolaboratif dalam tim-tim kerja. Berdasarkan data mutakhir, komposisi pegawai Balai TN Baluran disajikan menurut kategori sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik kondisi SDM Balai Taman Nasional Baluran tahun 2025

ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi fundamental dan mendesak yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pengelolaan Balai TN Baluran. Secara geografis, TN Baluran memiliki posisi yang sangat strategis karena dilalui oleh jalan utama nasional (Pantura) serta adanya rencana pembangunan Jalan Tol Probowangi yang menjadikan kawasan ini sebagai objek strategis pembangunan yang tidak dapat dielakkan.

Berdasarkan amanat Rencana Strategis (Renstra) Balai TN Baluran, terdapat beberapa aspek strategis dan permasalahan utama yang menjadi fokus pengelolaan pada tahun 2025:

1. Aspek Ekologi
   a. Fokus utama pada pemantauan dan peningkatan populasi satwa mandat yaitu Banteng *(Bos javanicus)* dan Macan Tutul Jawa *(Panthera pardus melas).*
   b. Mewujudkan pengelolaan terpadu untuk eradikasi *Invasive Alien Species* (IAS), khususnya tanaman *Vachellia nilotica* (sebelumnya Acacia nilotica) yang mengancam keutuhan ekosistem savana.
   c. Melakukan pemulihan ekosistem daratan seluas 200 Hektar serta menekan ancaman pencurian TSL dan gangguan kawasan melalui patroli perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan (Karhutla).
   d. Mencapai kepastian hukum melalui penetapan batas dan luas area serta penguatan penegakan hukum *(law enforcement)* di seluruh kawasan seluas 15.800 Ha.
2. Aspek Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
   a. Meningkatkan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata Alam di titik-titik strategis dengan tetap mengedepankan prinsip konservasi dan pengembangan Bina Cinta Alam.
   b. Memperkuat peran serta masyarakat sekitar melalui pola Kemitraan Konservasi, guna memberikan akses pemanfaatan jasa lingkungan yang legal demi kesejahteraan masyarakat yang memiliki ketergantungan pada sumber daya alam TN Baluran.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS (2025-2029)

Tahun 2025 menandai dimulainya pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Balai Taman Nasional Baluran periode 2025-2029. Dokumen ini disusun secara selaras (*alignment*) dengan Renstra Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), yang mengusung visi transformasi:

"Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial".

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara komprehensif, Subbagian Tata Usaha memegang peranan vital dalam penguatan kelembagaan melalui dukungan manajemen dan administrasi bagi seluruh unit tim kerja serta Satuan Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Peran ini diwujudkan melalui intervensi kebijakan internal, optimalisasi SDM fungsional, integrasi teknologi informasi, serta penguatan kemitraan strategis. Dukungan tersebut bermuara pada sasaran utama yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai TN Baluran yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan kerangka Reformasi Birokrasi.

Untuk memastikan pencapaian *good governance* dan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, ditetapkan empat pilar indikator kinerja utama sebagai fokus strategis selama 5 (lima) tahun ke depan:

1. Pilar Keutuhan Ekosistem (*Stakeholder Perspective*): Berfokus pada peningkatan Indeks Keutuhan Ekosistem (IKE) melalui perlindungan kawasan seluas ±25.000 Ha dan pemulihan habitat savana dari ancaman spesies invasif (*Acacia nilotica*), serta stabilisasi populasi satwa kunci (*Flagship Species*) seperti Banteng (*Bos javanicus*) dan Macan Tutul (*Panthera pardus melas*).
2. Pilar Ekonomi Masyarakat (*Customer Perspective*): Menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat penyangga melalui optimalisasi Nilai Transaksi Ekonomi dari kelompok binaan (Kemitraan Konservasi) dan peningkatan kualitas layanan wisata alam yang berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Pilar Proses Bisnis Internal (*Internal Process*): Menekankan pada efektivitas pengelolaan kawasan (*Management Effectiveness*) melalui pengamanan berbasis resor (*Resort Based Management*) dan pengendalian kebakaran hutan secara terpadu.
4. Pilar Tata Kelola (*Learning & Growth*): Penguatan kapasitas organisasi melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja (SAKIP) guna mewujudkan birokrasi yang lincah dan berorientasi hasil.

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan BTN Baluran 2025-2029

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25
Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	10	13	13	15	17
Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar		800			
Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	200	50	50	50	50
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit (Kumulatif)	1	1	1	1	1
Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan kehati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3	6	8	10	12
Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)					1
Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,90	3,92	3,94	3,97	4,00
Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	89,13	89,33	89,53	89,73	89,93

RENCANA KERJA 2025

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang, mulai dari tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Pada tahun 2025, penilaian atas implementasi SAKIP pada Balai Taman Nasional Baluran ditargetkan memperoleh nilai 89,13 poin, di mana angka tersebut menggambarkan bahwa Balai Taman Nasional Baluran telah berkinerja secara ekselen serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Proses ini berperan untuk memberikan keyakinan yang memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di Balai Taman Nasional Baluran ditargetkan mencapai level 3,9 poin, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah terdefinisi dan terlembagakan dengan sangat baik dalam setiap proses bisnis organisasi.

Kepala Balai Taman Nasional Baluran selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan instansi yang dipimpinnya. Balai Taman Nasional Baluran berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pada tahun 2025, ditargetkan untuk menyusun 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Balai Taman Nasional Baluran yang tertib dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Selain aspek tata kelola, Rencana Kerja Tahun 2025 juga difokuskan pada pemenuhan target teknis di tingkat tapak, yang meliputi pemantauan terhadap 5 Spesies prioritas nasional, pemulihan ekosistem savana seluas 200 Hektar, serta peningkatan perlindungan dan pengamanan kawasan pada areal seluas 15.800 Hektar. Melalui sinergi antara penguatan SAKIP, SPIP, dan profesionalitas SDM (dengan target Indeks Profesionalitas ASN sebesar 83,3 poin), Balai Taman Nasional Baluran berkomitmen mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi guna menghadapi berbagai tantangan pengelolaan kawasan konservasi ke depan.

PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen strategis yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan (kontrak kinerja) antara penerima dan pemberi amanah berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Bagi Balai Taman Nasional Baluran, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan representasi tekad dan janji kinerja tahunan yang mengikat antara Kepala Balai Taman Nasional Baluran dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Dokumen ini disusun selaras dengan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi serta dasar utama dalam penilaian dan evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran.

Secara substansi, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat dua dimensi target utama yang saling mendukung, yaitu:

1. Dimensi Hasil (Outcome) Pengelolaan Kawasan: Berfokus pada dampak nyata konservasi di tingkat tapak. Pada tahun 2025, Balai TN Baluran berkomitmen menjaga stabilitas keanekaragaman hayati melalui pemantauan intensif terhadap 5 (lima) spesies prioritas nasional serta pemulihan ekosistem savana seluas 200 Hektar dari ancaman spesies invasif. Di sisi keamanan kawasan, target perlindungan ditingkatkan mencakup area seluas 15.800 Hektar guna memastikan integritas kawasan tetap terjaga. Selain aspek ekologis, dimensi ini juga mencakup aspek ekonomi masyarakat, dengan target pembinaan terhadap 3 (tiga) kelompok masyarakat kemitraan konservasi serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa lingkungan pariwisata sebesar Rp3.351.100.000,-.
2. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan (Governance): Berfokus pada reformasi birokrasi dan kesehatan organisasi. Balai TN Baluran menargetkan peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Hal ini dicerminkan melalui target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 89,13 poin dan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 3,9 poin. Penguatan kapasitas SDM juga menjadi prioritas dengan target Indeks Profesionalitas ASN mencapai angka 83,3 poin, serta penyajian Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel.

Keseluruhan target tersebut ditetapkan untuk menjamin bahwa kinerja Balai Taman Nasional Baluran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran (*output based*), tetapi benar-benar memberikan manfaat (*outcome based*) bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

PERJALANAN PAGU

Pagu anggaran Balai Taman Nasional Baluran yang tercantum dalam DIPA Petikan Awal Tahun 2025 adalah sebesar Rp11.117.943.000,-. Seiring dengan dinamika kebijakan internal kementerian dan kebutuhan operasional di lapangan, pagu anggaran tersebut mengalami 11 kali proses revisi. Perubahan ini mencakup

penyesuaian belanja pegawai, kebijakan efisiensi sesuai Inpres No. 1/2025, hingga penyesuaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang digunakan kembali untuk mendukung pelayanan wisata alam.

Berdasarkan DIPA Revisi ke-11, pagu akhir Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp14.804.452.000,-. Jumlah ini terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp12.593.605.000,- dan sumber dana PNBP sebesar Rp2.210.847.000,-.

Anggaran tersebut terbagi menjadi dua pilar utama, yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.819.250.000,-, serta Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp2.985.202.000,- yang secara langsung membiayai kegiatan teknis konservasi di tingkat tapak. Dengan dukungan finansial yang akuntabel ini, Balai TN Baluran berkomitmen mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi kelestarian ekosistem.

Gambar 3. Grafik perjalanan pagu Balai TN Baluran tahun 2025

POHON KINERJA

Pohon Kinerja Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025 merupakan alur logis yang menunjukkan bagaimana setiap aktivitas operasional mendukung pencapaian sasaran organisasi. Struktur cascading ini memastikan adanya keselarasan antara mandat konservasi dengan pelaksanaan di tingkat tapak.

1. Sasaran Strategis
   Target tertinggi organisasi adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati. Capaian ini diukur melalui efektivitas pengelolaan kawasan dan penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani.
2. Sasaran Program & Sasaran Kegiatan
   Cascading diturunkan ke dalam dua pilar utama:

a. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Berfokus pada upaya pengawetan keanekaragaman spesies, pemulihan ekosistem, serta perlindungan dan pengamanan kawasan dari gangguan (Karhutla dan perburuan).
b. Dukungan Manajemen: Berfokus pada penguatan pengawasan internal (SPIP), kualitas reformasi birokrasi (SAKIP), profesionalitas ASN, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN.

3. Operasional dan Rincian Output
   a. Sub Bagian Tata Usaha (Dukungan Manajemen) Bertanggung jawab atas stabilitas organisasi dengan target utama:
      - Mencapai nilai Maturitas SPIP 3,80 Poin melalui pemantauan tindak lanjut hasil audit.
      - Mewujudkan kualitas reformasi birokrasi dengan target SAKIP 82,31 Poin.
      - Menjamin akuntabilitas pengelolaan Layanan BMN dan Layanan Umum serta memastikan Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Dasar) berjalan 100%.
   b. Menjamin akuntabilitas pengelolaan Layanan BMN dan Layanan Umum serta memastikan Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Dasar) berjalan 100%.
      - Konservasi Spesies: Penguatan data dan informasi hayati (1 Data) serta penyelamatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (1 Lokasi).
      - Pemulihan Ekosistem: Melakukan pemulihan ekosistem daratan seluas 200 Hektar (Fokus utama pada SPTN Wilayah I).
      - Perlindungan Kawasan: Menjamin keamanan kawasan seluas 15.800 Hektar melalui Smart Patrol terestrial bulanan yang dilakukan secara intensif oleh kedua SPTN.
      - Pengendalian Kebakaran: Menekan luas kebakaran hutan agar tidak melebihi ambang batas 554,5 Hektar per tahun.
      - Kemitraan Masyarakat: Melibatkan minimal 6 Orang masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan untuk meningkatkan dukungan lokal.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan elemen penting dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sasaran kegiatan Balai Taman Nasional Baluran adalah meningkatkan layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang akuntabel. Sasaran ini diturunkan secara berjenjang dari sasaran strategis KLHK pada pilar tata kelola dan sasaran program Sekretariat Jenderal KLHK. Sasaran strategis KLHK bertujuan untuk meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Sementara itu, sasaran program Sekretariat Jenderal KLHK berfokus pada peningkatan akuntabilitas KLHK. Setiap sasaran tersebut diukur menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada tahun 2025 Balai TN Baluran memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kesepuluh hal tersebut adalah (1) Jumlah Spesies yang Terdata Sebaran dan/atau Populasinya, (2) Jumlah Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel, (3) Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB, (4) Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif , (5) Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati , (6) Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA dan TB, (7) Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment, (8) Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB, (9) Nilai Maturitas SPIP Balai Taman Nasional Baluran dan (10) Nilai SAKIP Balai Taman Nasional Baluran.

Untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan (IKK) tersebut, Balai TN Baluran menerapkan pendekatan yang holistik dan berbasis data. Pendekatan ini melibatkan koordinasi internal unit kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi digital. Proses perencanaan dilakukan secara integratif dengan mempertimbangkan aspek spasial, keberlanjutan, serta inklusi.

Selain itu, Balai TN Baluran mengedepankan prinsip akuntabilitas melalui implementasi SAKIP yang berfokus pada hasil (outcome). Dalam rangka menjaga kualitas layanan perencanaan, Biro Perencanaan terus meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Target Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) juga menjadi perhatian khusus, mengingat peran strategisnya dalam mencerminkan optimalisasi penggunaan anggaran Balai TN Baluran. Dengan adanya perubahan metode pengukuran yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan, Balai TN Baluran melakukan penyesuaian untuk memastikan target tetap realistis dan relevan. Penyesuaian ini merupakan

bagian dari upaya menjaga sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan perannya, Balai TN Baluran melakukan kinerja tidak terbatas pada IKK, namun juga memiliki tugas dalam berbagai kegiatan lain seperti pengelolaan kerja sama dan tugas direktif pimpinan lainnya. Bab ini akan menjelaskan capaian atas indikator kinerja kegiatan, pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi, dan keberhasilan yang diraih oleh Balai TN Baluran di tahun 2025.

Tabel 3. Rekap IKK Balai TN Baluran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Capaian (%)
1	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	5 Spesies	5 Spesies	100%
2	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	0,57 Poin	0,69 Poin	121%
3	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB Balai Taman Nasional Baluran	200 Hektar	337,74 Hektar	150%
4	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	1 Unit	1 Unit	100%
5	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	3 Kelompok	3 Kelompok	100%
6	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	3,35 Milyar	5,02 Milyar	150%
7	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment	10 Persen	100 Persen	150%
8	Jumlah Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	10 Persen	92 Persen	150%
9	Nilai Maturitas SPIP Balai Taman Nasional Baluran	3,90 Poin	4,06 Poin	104.10%
10	Nilai SAKIP Balai Taman Nasional Baluran	89,13 Poin	89,15 Poin	100.02%
Capaian Kinerja 2025				**122.51%**

IKK
Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya

5 Spesies	5 Spesies	100%
TARGET JUMLAH SPESIES YANG TERDATA SEBARAN DAN/ATAU POPULASINYA	CAPAIAN JUMLAH SPESIES YANG TERDATA SEBARAN DAN/ATAU POPULASINYA	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Balai Taman Nasional Baluran turut berkontribusi pencapaian Indikator kinerja kegiatan Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya yang mana bertujuan untuk menyediakan data dan informasi terkait potensi keanekaragaman hayati. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah penyediaan data dan informasi kekayaan spesies, sebaran spesies, kepadatan serta estimasi populasi melalui kegiatan inventarisasi.

Analisis Capaian terhadap
Target Tahunan

Pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Kepala Balai TN Baluran untuk IKK Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya adalah sebanyak 5 Spesies dengan capaian sebesar 100%.

Target tahunan indikator ini diarahkan pada terdatanya spesies prioritas melalui kegiatan inventarisasi dan monitoring yang terencana, sistematis, dan berbasis metode ilmiah. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi satwa liar tahun 2025, Balai TN Baluran telah berhasil melakukan pendataan sebaran dan estimasi populasi terhadap lima (5) spesies target, yaitu Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*), Banteng Jawa (*Bos javanicus*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Ajag (*Cuon alpinus*), dan Kucing Hutan (*Prionailurus bengalensis*).
Pendataan dilakukan menggunakan metode camera trap dengan cakupan grid dan durasi pengamatan yang memadai, sehingga menghasilkan data populasi dan sebaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Gambar 4. Data Estimasi Populasi 5 Satwa Target tahun 2025

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi IKK telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan, baik dari sisi jumlah spesies yang berhasil didata maupun dari kualitas data yang dihasilkan. Dengan terpenuhinya target tahunan ini, Balai Taman Nasional Baluran telah menyediakan data dasar penting yang mendukung pelaksanaan konservasi spesies, pemantauan dinamika populasi satwa prioritas, serta kontribusi terhadap penyediaan data untuk asesmen spesies di tingkat nasional.

Gambar 5. Banteng Jawa di Suaka Satwa Banteng TN Baluran

Selain itu, Balai TN Baluran berkontribusi nyata dalam upaya konservasi satwa liar melalui pengelolaan Suaka Satwa Banteng (SSB). Saat ini terdapat 12 ekor banteng terdiri dari 5 jantan, 7 betina yang dipantau rutin baik dari sisi kebutuhan pakan maupun dari sisi kesehatan. Upaya konservasi satwa liar lainnya yang dilakukan pada tahu 2025 adalah pelepasliaran 9 ekor Babi Kutil Jawa (3 jantan dan 6 betina) ke habitat aslinya. Kegiatan ini merupakan hasil sukses dari program penangkaran yang dilakukan mitra kerjasama yaitu Copenhagen Zoo. Pelepasliaran ini juga menjadi

momen penting karena dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan RI, Bapak Raja Juli Antoni. Melalui berbagai kegiatan ini, Balai TN Baluran tidak hanya memenuhi target data spesies, tetapi juga memberikan bukti nyata dalam menjaga kelestarian satwa langka di tingkat nasional.

Gambar 6. Babi Kutil yang dilakukan pelapasliaran

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya merupakan salah satu indikator yang mendukung sasaran strategis Balai Taman Nasional Baluran dalam Renstra Tahun 2025–2029, khususnya pada aspek penguatan pengelolaan konservasi spesies berbasis data dan informasi keanekaragaman hayati. Target lima tahunan indikator ini diarahkan pada terpenuhinya data sebaran dan populasi spesies prioritas secara bertahap dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan kawasan.

Pada Tahun 2025, capaian indikator ini menunjukkan kontribusi awal yang signifikan terhadap pemenuhan target lima tahunan Renstra. Melalui kegiatan inventarisasi dan monitoring satwa liar periode 2024–2025, Balai Taman Nasional Baluran telah berhasil mendata sebaran dan estimasi populasi lima (5) spesies target, yang sebagian merupakan satwa prioritas dan/atau dilindungi. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam siklus pencapaian target Renstra, mengingat tahun 2025 merupakan fase awal implementasi rencana strategis jangka menengah.

Jika ditinjau secara kumulatif, capaian Tahun 2025 telah memberikan kemajuan terhadap target lima tahunan, baik dari sisi jumlah spesies yang telah terdata maupun dari kesiapan sistem dan metode pendataan yang digunakan. Data yang dihasilkan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi target indikator pada tahun berjalan, tetapi juga menjadi *baseline* bagi kegiatan monitoring lanjutan pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra. Dengan demikian, capaian tahun ini memiliki nilai strategis karena memperkuat kesinambungan pencapaian target hingga akhir periode Renstra.

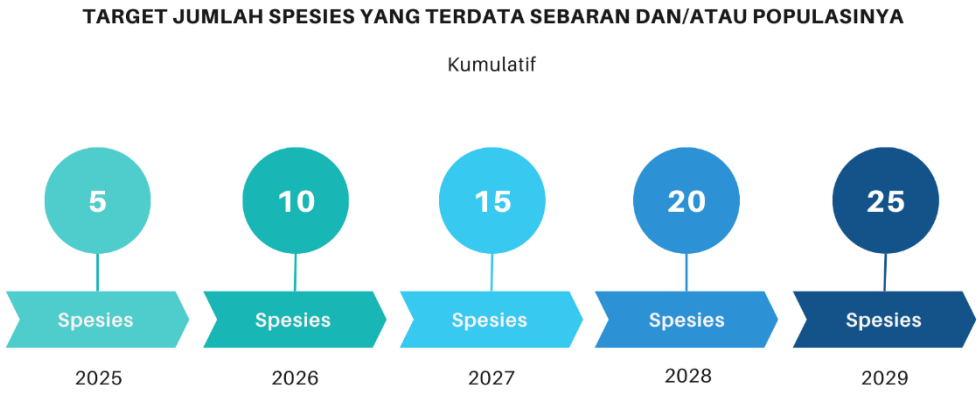

Gambar 7. Target Nilai Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya tahun 2025 - 2029

Secara keseluruhan, capaian IKK Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya hingga Tahun 2025 dinilai berada pada jalur yang sesuai dengan target lima tahunan Renstra Balai TN Baluran. Keberlanjutan pelaksanaan inventarisasi dan monitoring pada tahun-tahun berikutnya diharapkan mampu meningkatkan jumlah spesies yang terdata, memperkaya basis data keanekaragaman hayati, serta memperkuat kontribusi Balai TN Baluran dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE pada akhir periode Renstra.

Analisis Capaian terhadap
Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kualitas capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada periode sebelumnya, kegiatan pendataan spesies di Taman Nasional Baluran masih bersifat parsial dan terbatas pada jenis tertentu, serta belum sepenuhnya menghasilkan estimasi populasi dan peta sebaran yang terintegrasi untuk beberapa spesies prioritas.

Pada Tahun 2025, Balai TN Baluran telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan monitoring satwa liar secara lebih terencana dan komprehensif, dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta penggunaan metode yang terstandar, yaitu pemanfaatan *camera trap* dan analisis berbasis ilmiah. Hasil kegiatan ini memungkinkan terdatanya sebaran dan estimasi populasi terhadap lima (5) spesies target secara lebih akurat dan terdokumentasi, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang lebih berfokus pada pengumpulan data indikatif dan observasional, capaian Tahun 2025 telah menghasilkan data kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar *baseline* pengelolaan konservasi spesies. Peningkatan ini tidak hanya tercermin dari bertambahnya jumlah spesies yang terdata, tetapi juga dari meningkatnya kualitas data, baik dari sisi ketepatan metode, durasi pengamatan, maupun konsistensi pelaporan hasil.

Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 menunjukkan adanya tren perbaikan kinerja dalam pemenuhan indikator ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan di lapangan, serta komitmen Balai TN Baluran dalam memperkuat pengelolaan kawasan berbasis data dan informasi keanekaragaman hayati. Capaian ini diharapkan dapat menjadi pijakan yang lebih kuat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka mencapai target Renstra secara berkelanjutan.

Gambar 8. Pemasangan Camera trap dalam rangka Inventarisasi Populasi Satwa

Benchmarking

Balai Besar KSDA Jawa Timur
5 Spesies

Balai Taman Nasional Alas Purwo
5 Spesies

Balai Taman Nasional Meru Betiri
5 Spesies

Pada Renstra Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025-2029 telah ditetapkan target yang sama untuk IKK Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya kepada semua UPT. Target tersebut yaitu sebanyak tambahan 5 Spesies setiap tahunnya secara kumulatif, sehingga pada akhir periode Renstra dapat mencapai 25 Spesies. Meskipun target jumlah spesies yang terdata sama, akan tetapi setiap UPT memiliki jenis-jenis satwa yang berbeda yang menjadi target UPT tersebut.

Upaya dan Kendala

Upaya

- Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan monitoring satwa liar dilakukan secara terencana dengan penetapan spesies target yang selaras dengan mandat pengelolaan kawasan dan arahan Direktorat Jenderal KSDAE. Penentuan spesies prioritas dilakukan untuk memastikan kegiatan pendataan lebih fokus, efektif, dan memberikan dampak langsung terhadap pengelolaan konservasi spesies.
- Menerapkan metode pendataan yang terstandar dan berbasis ilmiah, antara lain melalui pemanfaatan *camera trap* dengan cakupan grid dan durasi pengamatan yang memadai. Upaya ini didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembelajaran teknis di lapangan, penguatan koordinasi internal antar-seksi, serta pendokumentasian dan pengelolaan data hasil inventarisasi secara lebih sistematis. Koordinasi dengan unit teknis terkait juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian metode dan hasil pendataan dengan kebutuhan data di tingkat nasional.

Kendala

- Kondisi lapangan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, keterbatasan akses pada beberapa lokasi pengamatan, serta adanya gangguan terhadap perangkat *camera trap* seperti kehilangan atau kerusakan alat di lapangan. Kondisi cuaca ekstrem dan variasi musim juga berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan data dan frekuensi kemunculan satwa pada lokasi pemantauan.
- Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah peralatan pendukung maupun alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, yang mengharuskan pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap. Selain itu, masih terdapat gangguan habitat akibat aktivitas manusia, seperti penggembalaan liar dan perburuan, yang berpotensi mempengaruhi pola sebaran satwa dan akurasi pendataan populasi.

Outcome

- Tersedianya data sebaran dan estimasi populasi spesies prioritas di TN Baluran yang lebih akurat, terukur, dan terdokumentasi. Data ini menjadi dasar penting dalam mendukung pengelolaan konservasi spesies berbasis bukti (*evidence-based management*), serta memperkuat proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan kawasan.
- Meningkatnya kapasitas Balai TN Baluran dalam melaksanakan inventarisasi dan monitoring keanekaragaman hayati secara terstandar. Penerapan metode ilmiah yang konsisten, pemanfaatan perangkat monitoring yang memadai, serta pengelolaan data yang lebih sistematis telah meningkatkan kualitas informasi keanekaragaman hayati yang dihasilkan. Hal ini mendukung kesinambungan pemantauan populasi dan sebaran spesies pada tahun-tahun berikutnya.
- Tersedianya data sebaran dan populasi spesies target memberikan kontribusi nyata terhadap upaya perlindungan satwa liar dan pengelolaan habitatnya. Informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi area penting bagi spesies prioritas, menentukan fokus pengamanan kawasan, serta merumuskan langkah-langkah pengelolaan dan pemulihan habitat yang lebih tepat sasaran.
- Mendukung kontribusi Balai Taman Nasional Baluran terhadap sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE, khususnya dalam penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati untuk mendukung asesmen spesies di tingkat nasional. Dengan demikian, capaian outcome dari indikator ini tidak hanya berdampak pada pengelolaan kawasan di tingkat tapak, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan konservasi spesies secara lebih luas.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Pencapaian Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya

Pencapaian IKK Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya tahun 2025 Balai TN Baluran mengalokasikan anggaran sebesar Rp.235.150.000,- yang terdiri dari 2 RO yaitu Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati (Rp.173.100.000,-) dan Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Rp.62.050.000,-). Dari total anggaran yang ada untuk mendukung capaian ini, realisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 234.171.470,- (99,58%).

Berdasarkan capaian realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan input yaitu persentase

realisasi anggaran dengan output yaitu capaian kinerja. Berdasarkan perhitungan efisiensi, nilai yang diperoleh adalah 0,99, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Balai TN Baluran cukup efisien terhadap capaian kinerja. Nilai tersebut kurang dari angka 1 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efektif untuk memenuhi sasaran.

Dalam pencapaian target IKK ini Balai TN Baluran juga mendapatkan dukungan dari mitra yaitu Copenhagen Zoo. Dukungan ini berbentuk penyediaan peralatan dalam rangka kegiatan inventarisasi populasi satwa berupa camera trap dan dukungan personil ketika pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.

Rekomendasi

- Melanjutkan inventarisasi dan monitoring spesies secara periodik dan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian indikator.
- Memperkuat dukungan sarana dan prasarana pendukung, khususnya perangkat *camera trap* dan sistem pengelolaan data.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam metode inventarisasi dan analisis data keanekaragaman hayati.
- Memperluas cakupan spesies yang didata secara bertahap dengan tetap memprioritaskan spesies kunci dan dilindungi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan data sebaran dan populasi spesies sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan kawasan.
- Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait serta integrasi data dengan sistem informasi keanekaragaman hayati nasional.

Gambar 9. Seekor Banteng jantan terpantau sedang minum di kubangan

IKK
Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB

0,57 Poin	0,69 Poin	121%
TARGET INDEKS EFEKTIFITAS PERENCANAAN KSA/KPA/TB	CAPAIAN INDEKS EFEKTIFITAS PERENCANAAN KSA/KPA/TB	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Perencanaan yang yang efektif adalah perencanaan yang dapat menjadi faktor pengungkit bagi efektifitas pengelolaan KSA, KPA dan TB secara keseluruhan. Perencanaan kawasan Taman Nasional Baluran merupakan enabling pengelolaan kawasan yang sistematis dan efisien sehingga diperlukan perencanaan kawaasan yang efektif dan terukur.

Analisis Capaian terhadap
Target Tahunan

Pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Kepala Balai TN Baluran untuk IKK Indek Efektivitas Perencanaan KSA KPA TB adalah 0,57 Poin. Balai TN Baluran berhasil mencapaian IKK ini dengan poin 0,69 sehingga secara persentase capaian yang diperoleh adalah sebesar 121%

Gambar 10. Nilai Indeks Efektifitas Perencanaan Balai TN Baluran

Alat ukur yang digunakan untuk penilaian efektivitas perencanaan TN Baluran diawali dengan penentuan kriteria, indikator, penentuan skala likert dan pembobotan. Penentuan kriteria penilaian didasarkan pada kegiatan perencanaan menurut PP 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa kegiatan perencanaan meliputi: pemolaan, inventarisasi potensi, penataan dan penyusunan rencana pengelolaan. Adapun indikator yang digunakan merupakan hasil kajian dan diskusi para pihak. Alat ukur yang dibangun berupa kriteria, indikator, bobot, skor dan kategori hasil penilaian efektivitas perencanaan kawasan konservasi.

Untuk penilaian keefektifan perencanaan TN Baluran, seluruh indikator yang berjumlah 20 diberi skor. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan bobot indikator menjadi nilai indikator. Penjumlahan dari seluruh nilai indikator adalah Total Nilai. Jika semua indikator skornya 5, maka total nilai yang diperoleh akan maksimal, yaitu 500.

Untuk memudahkan pemetaan keefektifan perencanaan kawasan, maka dilakukan pengelompokan total nilai perencanaan menjadi 3 kelas yaitu:
1. Kurang efektif dengan nilai < 150
2. Cukup efektif dengan nilai = 150 sd < 400
3. Efektif dengan nilai ≥ 400

Berdasarkan pengelompokan tersebut, nilai 345,66 dari keefektifan perencanaan kawasan TN Baluran masuk dalam kelompok **CUKUP EFEKTIF**

Gambar 11. Sosialisasi Program Kerja Balai TN Baluran dengan Bupati Situbondo

Dari keseluruhan kriteria dan indikator tersebut, hasil penilaian Balai TN Baluran sebagaimana gambar di bawah ini

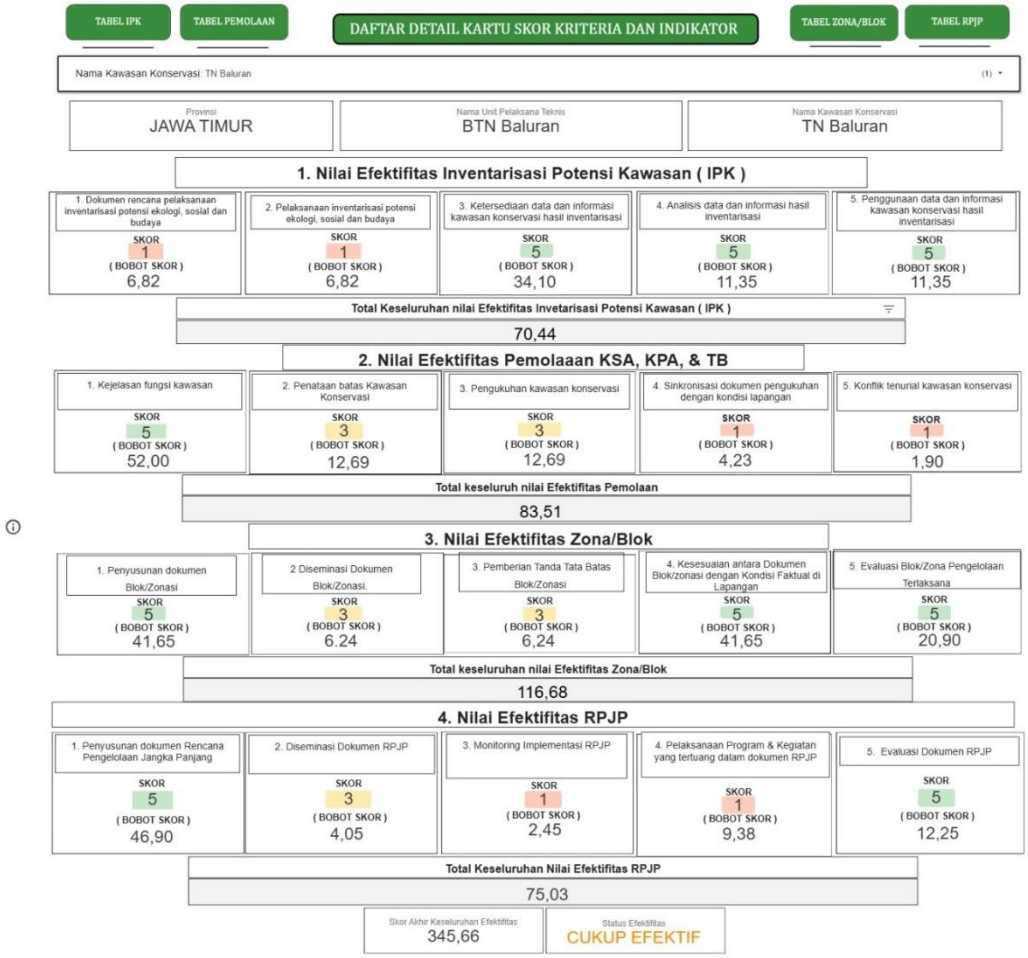

Gambar 12. Nilai Indeks Efektifitas Perencanaan Balai TN Baluran

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Indeks Efektifitas Perencanaan KSA, KPA dan TB telah tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 mulai dari tingkat Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Perencanaan Konservasi hingga tingkat UPT dimana pada tahun 2025 Balai TN Baluran telah mencapai target yang ditetapkan.

Data target tahunan mulai 2025 hingga 2029 sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 13. Grafik target Indeks Efektifitas Perencanaan tahun 2025 – 2029

Berdasarkan data grafik di atas, target capaian Indeks Efektifitas Perencanaan Balai TN Baluran setiap tahunnya meningkat sebesar 0,02 Poin. Bila mengacu capaian di tahun 2025, Balai TN Baluran telah berhasil mencapai sebesar 0,69 poin yang mana telah melebihi dari target yang harus dicapai hingga akhir periode Renstra di tahun 2029. Akan tetapi Direktorat Perencanaan Konservasi menargetkan total nilai dari keefektifan perencanaan setiap kawasan yang dikelola oleh UPT/UPTD adalah di atas 400 atau masuk dalam kelas/kategori Efektif dimana saat ini Balai TN Baluran masih dalam kelas/kategori Cukup Efektif dengan nilai 345,66, perlu dilakukan upaya untuk dapat masuk dalam kelas/kategori Efektif dengan nilai di atas 400.

Analisis Capaian terhadap
Tahun Sebelumnya

Capaian Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan TN Baluran pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada aspek tata kelola kawasan, khususnya dalam penerapan prinsip pengelolaan adaptif, penguatan perencanaan, serta peningkatan implementasi kegiatan pengelolaan lapangan.

Pada tahun sebelumnya, efektivitas pengelolaan kawasan masih dihadapkan pada keterbatasan optimalisasi implementasi rencana pengelolaan, khususnya pada aspek pemanfaatan data monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana pengelolaan turut mempengaruhi capaian indeks secara keseluruhan.

Meskipun terjadi peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, masih terdapat beberapa aspek pengelolaan yang memerlukan penguatan lebih lanjut, antara lain konsistensi pelaksanaan rencana pengelolaan jangka panjang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Hal ini menjadi perhatian untuk memastikan peningkatan indeks efektivitas pengelolaan dapat berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Benchmarking

Balai Besar Taman Nasional
Gunung Gede Pangrango
EFEKTIF 400,22
INDEKS 0,80

Balai Taman Nasional
Gunung Ciremai
CUKUP EFEKTIF 395,34
INDEKS 0,79

Balai Taman Nasional
Alas Purwo
CUKUP EFEKTIF 327,76
INDEKS 0,65

Kami melakukan Benchmarking data capaian yang ada pada beberapa UPT Taman Nasional di Pulau Jawa. Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango memiliki Nilai Efektifitas 400, 22 dengan Indek 0,80 dengan status EFEKTIF. Bila melihat data yang ada, hampir semua indikator dalam setiap kriteria/kategori memiliki skor sempurna (5) terkecuali pada Nilai Efektifitas RPJP dimana terdapat 3 indikator yang masih ber skor 1.

Begitu juga halnya dengan Balai TN Gunung Ciremai yang memiliki Nilai Efektifitas 395,34 dengan Indek 0,79 dengan status CUKUP EFEKTIF. Hanya 2 indikator yang memiliki nilai 1, akan tetapi beberapa indikator masih belum mendapatkan nilai sempurna yaitu masih pada rentang nilai 2 hingga 4. Sedangkan pada Balai TN Alas Purwo secara nillai dan indeks masih hampir sama dengan Baluran yaitu memiliki Nilai Efektifitas 327,76 dengan Indek 0,65 dengan status CUKUP EFEKTIF. Terdapat 7 indikator yang masih memiliki skor rendah.

Upaya dan Kendala

Upaya

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kawasan (Rencana Pengelolaan Taman Nasional) sebagai acuan pengelolaan kawasan konservasi secara terarah dan berkelanjutan.
2. Sinkronisasi perencanaan pengelolaan kawasan dengan dokumen perencanaan nasional guna meningkatkan keterpaduan program dan kegiatan.

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi.
4. Penguatan kapasitas SDM Balai TN Baluran melalui bimbingan teknis dan koordinasi internal terkait perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi.
5. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra) dalam mendukung implementasi perencanaan kawasan.

Kendala

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sehingga belum seluruh rencana pengelolaan kawasan TN Baluran dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Dinamika kondisi kawasan TN Baluran (tekanan pemanfaatan, perubahan tutupan lahan, dan gangguan kawasan) yang memerlukan penyesuaian rencana secara berkelanjutan.
3. Belum optimalnya integrasi data dan informasi perencanaan kawasan, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan dan evaluasi perencanaan.
4. Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam penyelarasan program antara pengelola kawasan dan pihak eksternal.
5. Perubahan kebijakan dan regulasi, yang memerlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun.

Outcome

Outcome yang diharapkan Balai TN Baluran dari Capaian IKK Indeks Efektifitas Perencanaan KSA,KPA/TB ini antara lain :

1. Terjaganya Keutuhan dan Fungsi Kawasan TN Baluran
   - Kawasan TN Baluran terlindungi dari alih fungsi dan degradasi.
   - Fungsi ekologis utama (perlindungan keanekaragaman hayati, habitat satwa, dan jasa lingkungan) tetap optimal.
2. Terlestarikannya Keanekaragaman Hayati
   - Populasi flora dan fauna, khususnya spesies endemik dan dilindungi di TN Baluran, berada dalam kondisi stabil atau meningkat.
   - Habitat penting satwa teridentifikasi dan terkelola dengan baik.
3. Tata Kelola Kawasan yang Jelas dan Terarah
   - Tersusunnya dokumen perencanaan yang komprehensif (rencana pengelolaan, zonasi, dan rencana kerja).
   - Kepastian batas, zonasi, serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukannya.

4. Pemanfaatan Kawasan yang Berkelanjutan
    - Aktivitas pemanfaatan (wisata alam, jasa lingkungan, penelitian dan pendidikan) sesuai daya dukung dan daya tampung.
    - Keseimbangan antara konservasi dan manfaat ekonomi.
5. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
    - Masyarakat sekitar kawasan terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan.
    - Berkurangnya konflik tenurial dan konflik manusia–satwa liar.
6. Menurunnya Gangguan dan Ancaman Kawasan
    - Penurunan tingkat perambahan, pembalakan liar, perburuan ilegal, dan kebakaran hutan.
    - Sistem pengendalian dan pengawasan berbasis perencanaan berjalan efektif.
7. Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Ilmu Pengetahuan
    - Perencanaan didukung data inventarisasi sumber daya alam yang mutakhir.
    - Monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyesuaian kebijakan dan pengelolaan adaptif.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Indeks Efektifitas Perencanaan KSA, KPA dan TB

Secara khusus IKK ini tidak didukung melalui alokasi pendanaan dalam anggaran Balai Taman Nasional Baluran tahun 2025. Meskipun demikian, kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian Indeks Efektivitas Perencanaan kawasan TN Baluran dapat berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian IKK ini dapat terlaksana dengan sangat efisien.

Rekomendasi

Perlu dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan beberapa indikator Nilai Efektifitas Balai TN Baluran yang masih mendapatkan Skor sangat kecil yaitu 1 (satu), bila dijabarkan per masing-masing kriteria/kategori antara lain :

1. Nilai Efektifitas Inventarisasi Potensi Kawasan
    - Dokumen rencana pelaksanaan invnetarisasi potensi ekologi, sosial dan budaya dan Pelaksanaan inventarisasi potensi ekologi, sosial dan budaya
2. Nilai Efektifitas Pemolaan KSA,KPA dan TB
    - Sinkronisasi dokumen pengukuhan dengan kondisi lapangan
    - Konflik tenurial kawasan konservasi
3. Nilai Efektifitas RPJP
    - Monitoring Implementasi RPJP
    - Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPJP

IKK

JUMLAH PERSENTASE ENTITAS KERJASAMA YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

10 Persen	92 Persen	150%
TARGET ENTITAS KERJASAMA YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	CAPAIAN JUMLAH ENTITAS KERJASAMA YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Dalam Upaya menjaga pelaksanaan Kerjasama di KSA, KPA, dan TB sesuai ketententuan dalam peraturan menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017 maka penillaian tata kelola kerjasama di KSA, KPA, dan TB menjadi sangat penting sehingga dapat diukur dengan tingkat efektivitasnya. Balai Taman Nasional Baluran merupakan bagian dari pengelolaan Kawasan dengan skema perjanjian Kerjasama. Pendekatan kolaboratif ini bertumpu pada tiga pilar utama: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel" merupakan metrik krusial dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan. IKK ini bertujuan mengukur kualitas kemitraan yang terjalin antara Balai Taman Nasional Baluran (BTN Baluran) dengan berbagai pihak eksternal, baik swasta, maupun masyarakat, dalam mencapai tujuan konservasi.

Analisis Capaian terhadap

Target Tahunan

Pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Kepala Balai TN Baluran untuk IKK Jumlah persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel adalah 10 Persen. Dari target tersebut Balai TN Baluran berhasil memperoleh capaian sebesar 92 Persen yang diukur terhadap seluruh entitas kerja sama aktif (capaian IKK 150,%).

Target tahunan indikator ini diarahkan pada terdatanya Penilaian efektivitas tata Kelola perjanjian kerja sama dilakukan berdasarkan 19 indikator yang masing-masing diberikan nilai secara kuantitatif. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan jumlah kerjasama yang efektif,efesien, transparan dan akuntabel tahun 2025 Balai TN Baluran telah berhasil melakukan Penilaian berdasarkan 19 indikator dengan nilai

yang diperoleh untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan Tingkat efektivitas tata kelola perjanjian kerja sama. Selanjutnya, total nilai diperoleh melalui penjumlahan seluruh nilai indikator yang kemudian dibagi dengan jumlah indikator, dan hasilnya dikalikan 100%

	entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel						
	Indikator Penilaian efektivitas tata kelola	**CZ**	**Banteng Afrika**	**Wahana Raya**	**PT.PLN (UIP)**	**PT.PLN (UIT)**	**PT.PLN (UID)**
Kelembagaan dan kepastian hukum							
1	Adanya PKS yang aktif dan sah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Adanya Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang aktif dan sah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Adanya Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) yang aktif dan sah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang aktif dan sah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Adanya rencana pelaksanaan kegiatan (RPK/ ToR)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Keselarasan antara PKS dengan RPP	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Keselarasan antara RKT dengan RPP	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Adanya persetujuan lingkungan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama							
9	Capaian output kegiatan sesuai rencana	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Besaran anggaran yang terealisasi sesuai rencana	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
11	Jenis/ bentuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Areal/ kegiatan kerja sama berada pada lokasi/ zona/ blok sesuai peruntukannya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Laporan tahunan disusun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Transparansi dan akuntabilitas							
16	Pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan/atau kesepakatan para pihak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
17	Penggunaan anggaran kegiatan mengikuti standar yang berlaku	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
18	Pengelolaan barang hasil kerjasama tertib	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
19	Temuan/ rekomendasi ditindaklanjuti	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Gambar 14. Target Nilai Maturitas SPIP tahun 2025 - 2029

Dari 19 indikator penilaian yang dilakukan penilaian terhadap 6 Perjanjian Kerja Sama (PKS) aktiv yang ada di Balai TN Baluran, terdapat 1 indikator penilaian yang tidak dapat dipenuhi oleh semua mitra. Indikator tersebut adalah indikator yang berkaitn dengan Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama. Seluruh PKS belum memenuhi capaian terkait “Besaran anggaran yang terealisasi sesuai rencana”. Pada tahun berjalan masih terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) belum dapat berjalan sesuai rencana. Akan tetapi kegiata-kegiatan tersebur akan dilanjutkan/dimasukkan kembali pada RKT tahun berikutnya.

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) *Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel* selaras dengan arah kebijakan Renstra Balai TN Baluran Tahun 2025–2029 yang menekankan pengelolaan kawasan berbasis kemitraan multipihak.

Target lima tahunan indikator ini dalam Renstra Balai TN Baluran ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh kerja sama yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis pengelolaan kawasan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra, sehingga capaian indikator pada tahun ini menjadi tolak ukur awal (baseline) dalam pencapaian target lima tahunan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, persentase entitas kerja sama yang memenuhi kriteria efektif, efisien, transparan, dan akuntabel telah mencapai target yang ditetapkan hingga akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kerja sama Balai TN Baluran pada awal periode Renstra telah dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang direncanakan.

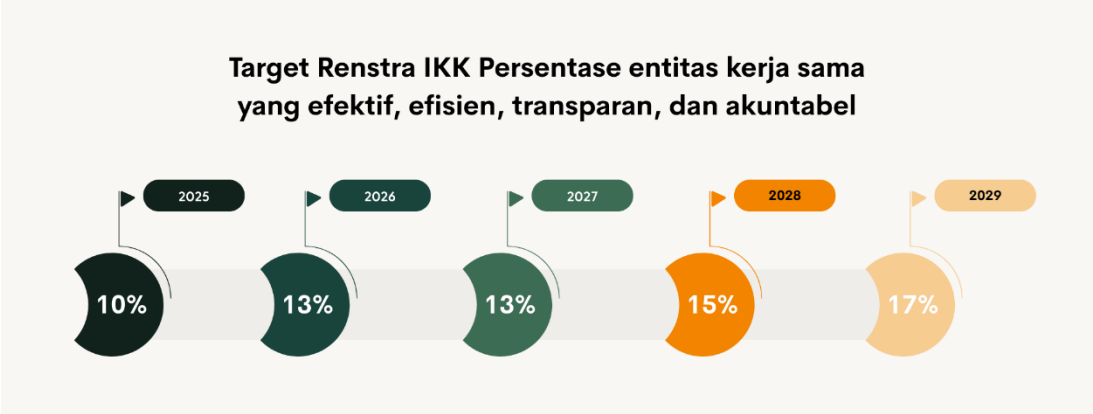

Gambar 15. Target IKK Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Capaian tersebut didukung oleh konsistensi perencanaan kerja sama, penetapan peran dan tanggung jawab para pihak secara jelas dalam dokumen perjanjian, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama. Kerja sama yang dibangun juga telah diarahkan untuk mendukung Sasaran Program Ditjen KSDAE, antara lain melalui kegiatan konservasi kawasan, pemulihan ekosistem, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan, serta pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam secara berkelanjutan.

Gambar 16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja sama

Analisis Capaian terhadap

Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025 merupakan tahun awal periode Renstra 2025-2029 dimana terkait pelaksanaan kerja sama target yang ditetapkan adalah Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel target yang ditetapkan merupakan besaran persentase. Sedangkan pada tahun 2024 target kerjasama berupa Dokumen kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis.

Pada tahun 2024 terdapat 8 Perjanjian Kerja Sama aktiv sedangkan pada tahun 2025 hanya menyisakan 6 Perjanjian Kerja Sama aktiv. Secara umum capaian IKK Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan dalam tata kelola kerja sama, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama yang dilaksanakan oleh Balai TN Baluran.

Perbaikan capaian ini didorong oleh semakin tertatanya mekanisme kerja sama, antara lain melalui penyesuaian dokumen perjanjian kerja sama, kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab para pihak, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan dan akuntabilitas. Selain itu, intensifikasi koordinasi dengan mitra kerja sama dan penguatan fungsi pengendalian internal turut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja sama.

Gambar 17. Fasilitas Visitor Center yang sudah didukung layanan sistem pembayaran *drive thrue*

Benchmarking

Balai Besar KSDA Jawa Timur
10 Persen

Balai Taman Nasional Alas Purwo
10 Persen

Balai Taman Nasional Meru Betiri
10 Persen

Dalam upaya meningkatkan pencapaian IKK Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel, Balai TN Baluran melaksanakan benchmarking melalui studi literatur dan analisis data sekunder terhadap beberapa UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Balai TN Meru Betiri, Balai Besar KSDA Jawa Timur, dan Balai TN Alas Purwo.

Benchmarking pelaksanaan IKK Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel pada Balai TN Baluran dilakukan dengan membandingkan praktik pengelolaan kerja sama pada UPT KSDAE di wilayah Jawa Timur, yaitu Balai Besar KSDA Jawa Timur, Balai TN Meru Betiri, dan Balai TN Alas Purwo. Ketiga UPT tersebut menjadi rujukan karena telah mengelola kerja sama multipihak secara relatif tertata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pengelolaan kawasan konservasi.

Hasil benchmarking menunjukkan bahwa Balai Besar KSDA Jawa Timur telah menerapkan pengelolaan kerja sama yang didukung oleh dokumentasi perjanjian yang lengkap, mekanisme pelaporan yang rutin, serta pengendalian internal yang memadai, sehingga pelaksanaan kerja sama lebih terukur dan akuntabel. Sementara itu, Balai Taman Nasional Meru Betiri dan Balai Taman Nasional Alas Purwo menonjol dalam penguatan koordinasi dengan mitra serta integrasi program kerja sama dengan rencana pengelolaan kawasan, yang berdampak pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dibandingkan dengan UPT tersebut, Balai TN Baluran telah berada pada arah yang sejalan dalam penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kerja sama. Namun demikian, hasil benchmarking mengidentifikasi perlunya penguatan evaluasi kinerja mitra secara periodik serta optimalisasi pemanfaatan hasil kerja sama agar kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja utama semakin signifikan. Secara keseluruhan, benchmarking ini menjadi dasar bagi Balai Taman Nasional Baluran untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kerja sama yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan akuntabel.

Upaya dan Kendala

Upaya

- Penilaian Tata Kelola PKS: Balai TN Baluran aktif melakukan penilaian efektivitas tata kelola PKS berdasarkan 19 indikator kuantitatif. Penilaian ini mencakup aspek keuangan, operasional, dan administrasi, memastikan bahwa setiap PKS didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur.
- Pembinaan dan Pendampingan: Balai TN Baluran secara terus-menerus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mitra untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai standar dan mencapai tujuan yang ditetapkan.
- Perbaikan Tata Kelola Internal: Melakukan perbaikan tata kelola penganggaran, administrasi, dan kerja sama, terutama yang berkaitan dengan kegiatan Pemulihan Ekosistem.

Kendala

- Kinerja Mitra Bervariasi: Adanya mitra yang belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan sesuai RPP dan RKT, seperti kasus pembekuan PKS WRMB karena capaian tidak memuaskan pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua entitas dapat secara konsisten memenuhi kriteria efektivitas dan akuntabilitas;
- Ketidakpastian Anggaran: Perlunya kepastian penganggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai tata waktu dan kondisi alam, yang juga memengaruhi efisiensi dan transparansi;
- Koordinasi dan Komunikasi: Menjaga koordinasi yang efektif dan komunikasi yang responsif dengan berbagai jenis mitra (internasional, lokal) dapat menjadi tantangan.

Outcome

Capaian IKK Persentase Entitas Kerja Sama yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel pada Balai TN Baluran Tahun 2025 berdampak pada meningkatnya kualitas tata kelola kerja sama dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kerja sama yang dikelola secara akuntabel dan transparan mendukung optimalisasi sumber daya serta memperkuat peran mitra dalam perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem, dan peningkatan pelayanan publik. Secara keseluruhan, capaian ini berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi dan terwujudnya pengelolaan Taman Nasional Baluran yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Secara khusus IKK ini tidak didukung melalui alokasi pendanaan dalam anggaran Balai TN Baluran tahun 2025. Meskipun demikian, kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian Persentase entitas kerja sama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian IKK ini dapat terlaksana dengan sangat efisien.

Rekomendasi

Rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pencapaian pada tahun-tahun berikutnya antara lain :

- Perlu melakukan penguatan tata kelola kerja sama secara berkelanjutan. Penguatan tersebut diarahkan tidak hanya pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaan dan dampak kerja sama terhadap pencapaian sasaran strategis pengelolaan kawasan konservasi.
- Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kerja sama, baik melalui pembinaan internal maupun koordinasi yang lebih intensif dengan mitra kerja sama. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan perbedaan pemahaman dan kapasitas antar mitra serta meningkatkan konsistensi pelaporan dan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama.
- Hasil pelaksanaan kerja sama perlu dioptimalkan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan strategis dan perencanaan program, sehingga kerja sama yang dilaksanakan memberikan nilai tambah yang nyata bagi organisasi.

Gambar 18. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan oleh mitra

IKK

Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB Balai Taman Nasional Baluran

200 Hektar	337,74 Hektar	150%
TARGET LUAS PEMULIHAN EKOSISTEM DI KSA,KPA DAN TB BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN	CAPAIAN LUAS PEMULIHAN EKOSISTEM DI KSA,KPA DAN TB BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Pemulihan ekosistem merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis suatu kawasan yang mengalami degradasi ke kondisi semula atau mendekati kondisi alaminya. Urgensi pemulihan ekosistem di Taman Nasional Baluran sangat tinggi, terutama mengingat adanya invasi *Vachellia nilotica* yang mengancam keanekaragaman hayati dan mengubah struktur savana.

Keberadaan *V. nilotica* di TN Baluran telah menyebabkan invasi savana yang signifikan, menekan keberadaan vegetasi asli, dan mengubah tipe vegetasi menjadi tegakan homogen *V. nilotica*. Upaya pemulihan sangat krusial untuk menjaga fungsi ekologis kawasan, melindungi keanekaragaman hayati, serta mendukung keberlanjutan ekosistem di TN Baluran. Sejarah upaya pemulihan ekosistem di Baluran telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan berbagai metode dan strategi yang diterapkan untuk mengendalikan *V. nilotica* dan merehabilitasi savana. Namun, invasi yang gigih dari spesies ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan adaptif.

Analisis Capaian terhadap

Target Tahunan

Untuk tahun 2025, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai TN Baluran dengan Direktur Jenderal Konservasi SUmber Daya Alam dan Ekosistem menetapkan target pemulihan ekosistem di TN Baluran seluas 200 hektar. Dari target tersebut TN Baluran berhasil mencapai luas pemulihan ekosistem sebesar 337,74 hektar. Capaian ini merupakan hasil akumulasi dari kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dan kerja sama dengan mitra. Realisasi ini memenuhi target yang ditetapkan dengan perentase 150%.

Pemulihan ekosistem di Taman Nasional Baluran dilaksanakan melalui berbagai jenis kegiatan yang bertujuan mengembalikan fungsi ekologis savana dan habitat satwa liar. Pemulihan ekosistem dilaksanakan melalui beragam kegiatan teknis di lapangan, baik secara swakelola maupun melalui kerja sama denga mitra. Jenis tindakan pemulihan ekosistem meliputi eradikasi jenis invasif, pembersihan/pengendalian gulma, rehabilitasi vegetasi melalui penanaman dan penaburan rumput lokal, pemeliharaan savana prioritas, serta percepatan proses pemulihan melalui pengelolaan habitat.

Tabel 4. Capaian Pemuihan Ekosistem di Taman Nasional Baluran

NO	URAIAN KEGIATAN	LUAS (Hektar)
1	**Swakelola**	
	Penanaman Rumput dengan Metode Halfmoon	0,50
	Pemeliharaan Savana Prioritas	32,93
	Penaburan Biji di Evergreen	0,50
	Eradikasi Tegakan V. nilotica RPTN Watunumpuk	7,76
	Eradikasi Tegakan V. nilotica RPTN Balanan	1,03
2	**Kerja Sama Mitra (Copenhagen Zoo)**	
	Eradikasi Tegakan V. Nilotica	34,96
	Penanaman Rumput	26,97
	Pembersihan Gulma dan Semai	170,16
3	**Kerja Sama Mitra (Kelompok Masyarakat Banteng Afrika)**	
	Pembersihan Gulma	62,92
TOTAL LUASAN		**337,73**

Data ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak internal Balai TN Baluran dan mitra eksternal sangat efektif dalam mencapai target pemulihan. Peran Copenhagen Zoo dalam menyediakan dukungan teknis dan finansial, serta partisipasi aktif kelompok masyarakat lokal, menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai luasan yang signifikan.

Meskipun capaian luasan pemulihan ekosistem Baluran telah melampaui target, laporan mengindikasikan bahwa kegiatan pemulihan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembukaan areal terbuka. Hal ini karena fokus utama kegiatan adalah eradikasi *V. nilotica* dan penanaman rumput pakan satwa, yang lebih bertujuan pada restorasi ekologis daripada pembukaan lahan secara masif.

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Taman Nasional Baluran tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pemulihan Ekosistem diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi ekosistem kawasan melalui kegiatan rehabilitasi habitat, pengendalian spesies invasif, pemulihan tutupan vegetasi, serta peningkatan daya dukung ekosistem secara berkelanjutan.

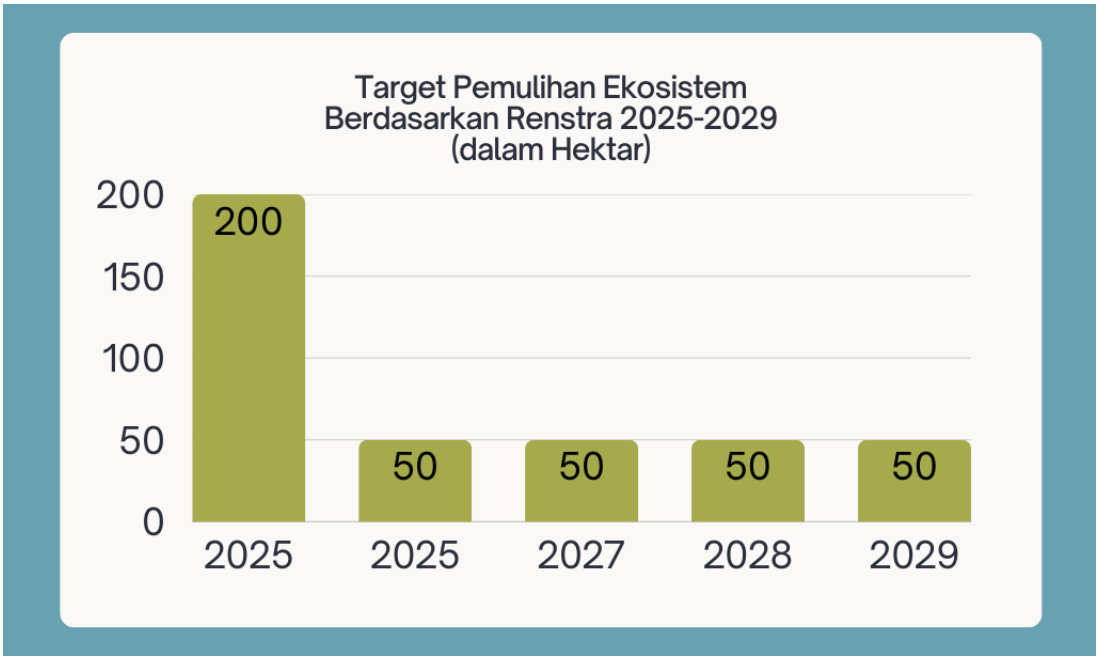

Gambar 19. Target Pemuihan Ekosistem Tahun 2025-2029

Hingga tahun 2025, capaian IKK Pemulihan Ekosistem menunjukkan kecenderungan positif dan berada pada jalur yang sesuai dengan target Renstra. Berbagai program pemulihan telah dilaksanakan secara bertahap dan terencana, antara lain rehabilitasi lahan terdegradasi, pengendalian spesies invasif, serta pengayaan jenis vegetasi asli pada ekosistem savana dan hutan. Implementasi kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas habitat dan stabilitas ekosistem kawasan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra lima tahunan, capaian hingga tahun berjalan telah memenuhi sebagian besar milestone yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemulihan ekosistem yang diterapkan telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, terutama pada kegiatan pemeliharaan pasca-rehabilitasi dan perluasan area pemulihan pada lokasi dengan tingkat degradasi tinggi.

Secara umum, capaian IKK Pemulihan Ekosistem terhadap target Renstra dapat dinilai on track, dengan progres yang konsisten dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi antarunit kerja, keterlibatan para pihak, serta peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian, meningkatkan efektivitas pemulihan, dan memastikan bahwa hasil pemulihan ekosistem memberikan dampak jangka panjang terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis Taman Nasional Baluran.

Gambar 20. Eradikasi tanaman invasif *Vachelia nilotica*

Analisis Capaian terhadap
Tahun Sebelumnya

Pemulihan ekosistem di TN Baluran pada 2024-2025 mencerminkan kemajuan signifikan dalam mengatasi invasi *Vachellia nilotica* (akasia) yang telah mengubah savana menjadi tegakan homogen selama lebih dari 35 tahun. Capaian 2025 (337,74 ha) meningkat 11-35% dari 2024, di mana TNB mencapai 250-300 ha. Peningkatan ini didorong oleh kemitraan (Copenhagen Zoo dan Kelompok Masyarakat banteng Afrika) dan swakelola, dengan fokus pada rehabilitasi dibandingkan pada tahun 2024 yang lebih pada pembersihan area terdampak melalui eradikasi.

Upaya Dan Kendala

Upaya

- Pemantauan Intensif: Dilakukan terhadap kondisi lapangan dan prakiraan cuaca untuk memastikan penanganan dapat dilaksanakan tepat waktu dan metode. Ini mencakup pemantauan pertumbuhan *V. nilotica* dan gulma lain, serta kondisi tanah untuk penanaman rumput.
- Pembinaan dan Pendampingan Mitra: Memberikan secara terus-menerus kepada mitra kerja sama melalui pertemuan rutin, bimbingan teknis di lapangan, dan evaluasi berkala. Perbaikan tata kelola kerja sama juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan.
- Perbaikan Tata Kelola Anggaran dan Administrasi: Dilakukan upaya untuk memperbaiki tata kelola penganggaran dan administrasi agar alokasi dana lebih stabil dan pencairan lebih terprediksi, serta komunikasi yang lebih intensif dengan pihak terkait untuk mengamankan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Kendala

- Perubahan Musim yang Sulit Diprediksi: Pola iklim yang semakin tidak menentu secara langsung mempengaruhi pertumbuhan *V. nilotica* dan gulma lainnya, serta keberhasilan penanaman rumput. Pemantauan fenologi tumbuhan invasif menjadi lebih kompleks, dan penentuan waktu kegiatan harus sangat presisi. Perubahan musim yang ekstrem atau tidak terduga dapat mempersulit jadwal eradikasi atau penanaman, mengurangi efektivitas, dan meningkatkan biaya operasional.
- Kinerja Mitra Kerja Sama yang Belum Optimal: Beberapa mitra belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Pola Pemanfaatan dan Rencana Kerja Tahunan yang disepakati. Selain itu, implementasi teknis kegiatan di lapangan terkadang tidak sesuai dengan metode yang telah ditentukan dalam pedoman. Contoh nyata adalah pembekuan sementara PKS Wahana Raya Merak Baluran pada tahun 2025 karena capaian yang tidak memuaskan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat terhadap mitra.
- Ketidakpastian Penganggaran: Ketersediaan anggaran yang fluktuatif atau ketidakpastian dalam pencairan dana dapat menghambat kelancaran operasional dan menyebabkan penundaan kegiatan penting. Hal ini berpotensi mengganggu ritme kerja dan efektivitas program, terutama dalam jangka panjang, karena pemulihan ekosistem membutuhkan komitmen finansial yang berkelanjutan.

Outcome

Terwujudnya peningkatan kondisi dan fungsi ekosistem alami di Taman Nasional Baluran secara berkelanjutan, yang ditandai dengan pulihnya struktur dan komposisi vegetasi asli, menurunnya tingkat degradasi habitat, serta meningkatnya daya dukung kawasan terhadap keanekaragaman hayati. Pemulihan ekosistem tersebut berkontribusi pada terjaganya keseimbangan ekologis, peningkatan kualitas habitat satwa liar, serta penguatan ketahanan ekosistem kawasan dalam menghadapi tekanan lingkungan dan perubahan iklim.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Pencapaian Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB Taman Nasional Baluran

Aspek pembiayaan dan tata waktu menjadi pilar penting dalam keberhasilan program pemulihan ekosistem di TN Baluran. Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dari alokasi anggaran sebesar Rp 63.277.000,- dengan realisasi sebesar Rp 60.167.772,- (95,09%). Berdasarkan capaian realisasi anggaran tersebut, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan input yaitu persentase realisasi anggaran dengan output yaitu capaian kinerja. Berdasarkan perhitungan efisiensi, nilai yang diperoleh adalah lebih dari 0,63, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Balai TN Baluran sangat efisien terhadap capaian kinerja. Nilai tersebut kurang dari angka 1 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efektif untuk memenuhi sasaran.

TN Baluran mampu mengoptimalkan anggaran terbatas untuk mencapai hasil yang melampaui target, menunjukkan perencanaan dan eksekusi yang baik. Keterlibatan mitra (Copenhagen Zoo dan Kelompok Masyarakat Banteng Afrika) menjadi kunci efisiensi, mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah semata. Efisiensi ini berdampak positif pada keberlanjutan program pemulihan dan konservasi di TN Baluran.

Gambar. Eradikasi tanaman invasif Vachelia nilotica oleh mitra Copenhagen Zoo

Rekomendasi

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan program pemulihan ekosistem di Balai TN Baluran, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan:

1. Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem Jangka Panjang yang Adaptif yang tidak hanya mencakup target luasan, tetapi juga strategi adaptif terhadap perubahan iklim dan invasi SAI. RPE harus terintegrasi dengan rencana pengelolaan kawasan secara keseluruhan, mempertimbangkan dinamika ekologis dan sosial.
2. Peningkatan Kapasitas dan Pengawalan Mitra secara Berkelanjutan melalui pembinaan dan pendampingan teknis kepada mitra perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Ini termasuk pelatihan reguler mengenai metode terbaik, pemantauan kualitas pelaksanaan di lapangan, dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel. Perjanjian Kerja Sama harus diperkuat dengan klausul yang lebih ketat mengenai kualitas dan target capaian.
3. Penguatan Tata Kelola Anggaran dan Pendanaan Jangka Panjang untuk mendapatkan kepastian dan peningkatan alokasi anggaran yang stabil.
4. Pengembangan dan Implementasi Teknologi Pemantauan Lanjut dengan manfaatkan teknologi seperti citra satelit, drone, dan sistem informasi geografis untuk memantau perubahan tutupan lahan, penyebaran *V. nilotica*, dan keberhasilan penanaman secara lebih efisien dan akurat. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan penyesuaian strategi secara real-time.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Edukasi Lingkungan dengan melibatkan masyarakat lokal secara lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemulihan ekosistem. Edukasi mengenai pentingnya konservasi dan dampak SAI harus terus digalakkan untuk menumbuhkan kesadaran dan dukungan yang lebih luas dari komunitas sekitar Taman Nasional Baluran.

Gambar 21. Savana prioritas pasca dilakukan pemeliharaan

IKK
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif

1 UNIT	1 UNIT	100%
TARGET JUMLAH UNIT KSA, KPA, DAN TB DENGAN KATEGORI PENGELOLAAN EFEKTIF	CAPAIAN JUMLAH UNIT KSA, KPA, DAN TB DENGAN KATEGORI PENGELOLAAN EFEKTIF	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan Balai Taman Nasional Baluran untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan, selanjutnya hasil tersebut pun dapat digunakan untuk mengidentifikasi prioritas serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pengelolaan. Penilaian efektivitas pengelolaan pun mendukung terlaksananya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.

Pengelolaan efektif dimaknai sebagai kondisi di mana kawasan memiliki sistem perlindungan, pengamanan, dan pengendalian ancaman yang berjalan secara fungsional, serta didukung oleh tata kelola kelembagaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan konservasi.

Analisis Capaian terhadap
Target Tahunan

Pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Kepala Balai TN Baluran untuk IKK Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif adalah sebanyak 1 Unit dengan capaian sebesar 100%.

Pada tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Kegiatan berupa jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif telah memenuhi target tahunan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja Balai TN Baluran. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan siklus pengelolaan kawasan konservasi yang meliputi aspek perencanaan, penyediaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan pengelolaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pencapaian indikator ini didukung oleh tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan kawasan, pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penerapan mekanisme pemantauan pengelolaan kawasan yang mengacu pada standar dan kriteria penilaian efektivitas pengelolaan sebagaimana diatur dalam Renstra Balai TN Baluran. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai efektivitas pengelolaan kawasan.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan di TN Baluran dilakukan melalui kegiatan Smart Patrol yaitu sistem patroli modern berbasis teknologi *Spatial Monitoring and Reporting Tools* (SMART) yang menggunakan aplikasi digital dan perangkat GPS untuk mengumpulkan, menganalisis, serta melaporkan data lapangan secara sistematis. Pada tahun 2025, kegiatan Smart Patrol (Darat, Perairan, dan Udara) telah berhasil mencakup sebanyak 329 Grid Pengelolaan dari .... Grid Pengelolaan yang ada di TN Baluran dengan total cakupan luasan Smart Patrol di tahun 2025 adalah seluas 27.581 Ha.

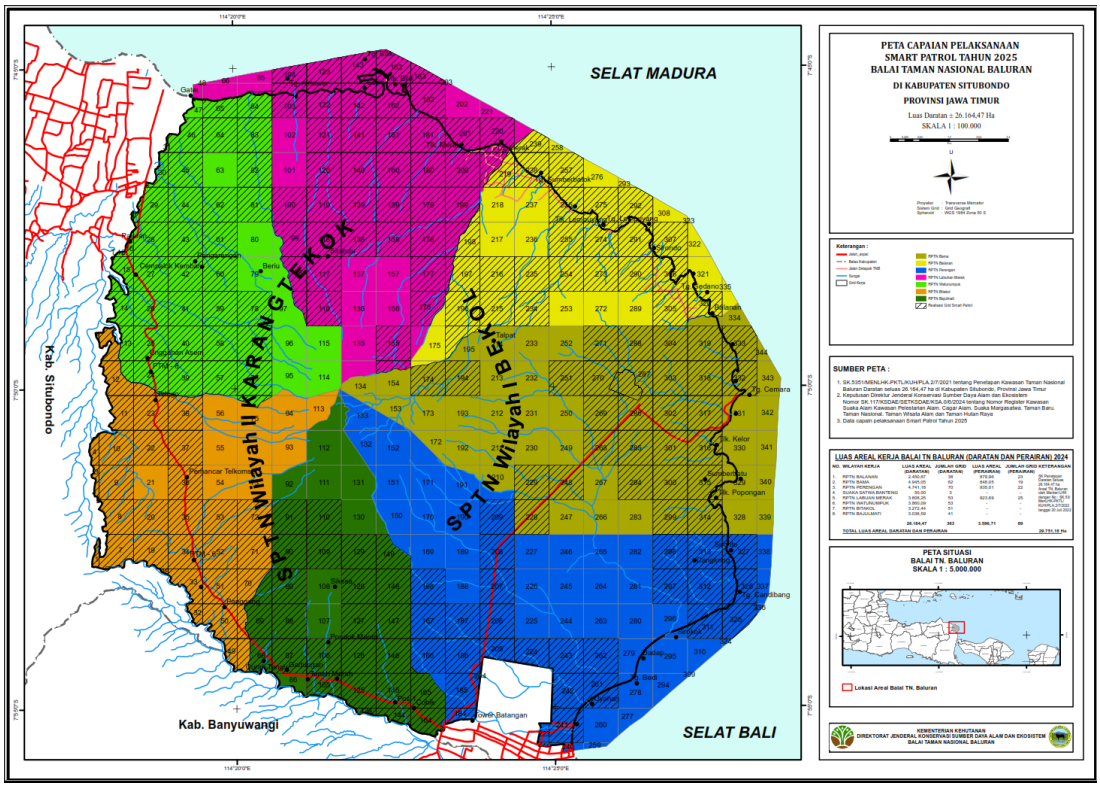

Gambar 22. Data cakupan wilayah Smart Patrol di TN baluran tahun 2025

Untuk penanganan kebakaran hutan telah berjalan dengan sangat optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut antara lain :

- Penguatan jumlah personil pengendali kebakaran hutan berbasis masyarakat (MPA dan MMP) menjadi 49 orang personil yang tersebar di setiap Resort.

- Peningkatan koordinasi antara pos-pos resor dengan posko pengendalian kebakaran.
- Respon time yang lebih cepat terhadap kejadian kebakaran hutan sehingga api dapat dikendalikan sebelum meluas. Hal ini dapat terlihat dari data rata-rata luas kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2025 lebih kecil dari 2 tahun sebelumnya.

Gambar 23. Data kebakaran hutan di TN baluran tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menggunakan Nilai Management Effectiveness Tracking Tool (METT) sebagai indikator efektivitas pengelolaan Kawasan TN Baluran menunjukkan nilai capaian Skor 87 poin. Capaian Nilai METT tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan Balai TN Baluran dalam meningkatkan kualitas tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh, yang meliputi aspek konteks kawasan, perencanaan pengelolaan, input sumber daya, proses pengelolaan, output kegiatan, serta outcome pengelolaan. Penilaian METT dilaksanakan secara periodik dan terstruktur sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kondisi pengelolaan kawasan secara objektif dan terukur.

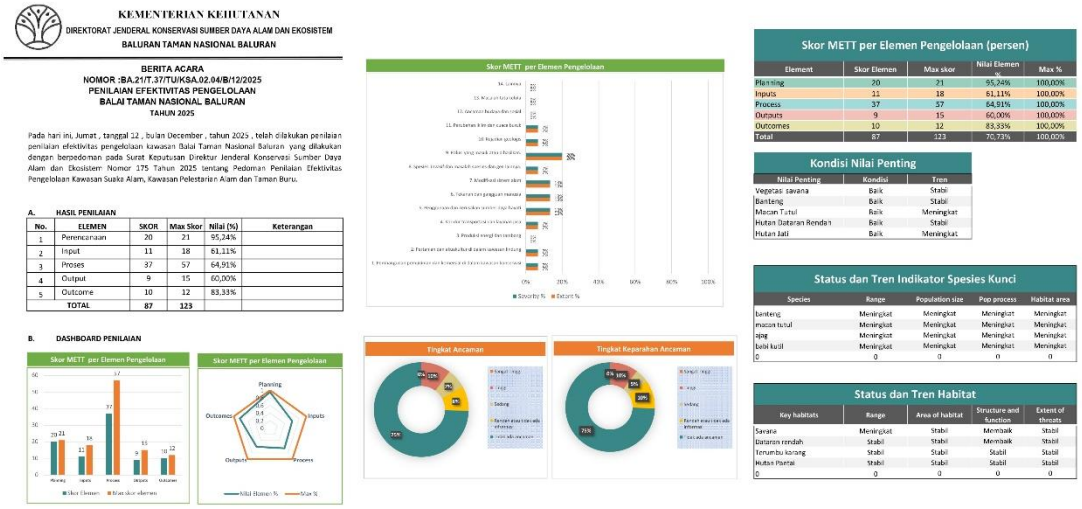

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALURAN TAMAN NASIONAL BALURAN

BERITA ACARA
NOMOR :BA.21/T.37/TU/KSA.02.04/B/12/2025
PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN
TAHUN 2025

Pada hari ini, Jumat , tanggal 12 , bulan December , tahun 2025 , telah dilakukan penilaian penilaian efektivitas pengelolaan kawasan Balai Taman Nasional Baluran yang dilakukan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 175 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

A. HASIL PENILAIAN

No.	ELEMEN	SKOR	Max Skor	Nilai (%)	Keterangan
1	Perencanaan	20	21	95,24%	
2	Input	11	18	61,11%	
3	Proses	37	57	64,91%	
4	Output	9	15	60,00%	
5	Outcome	10	12	83,33%	
	TOTAL	87	123		

B. DASHBOARD PENILAIAN

Skor METT per Elemen Pengelolaan

Skor METT per Elemen Pengelolaan (persen)

Element	Skor Elemen	Max skor	Nilai Elemen %	Max %
Planning	20	21	95,24%	100,00%
Inputs	11	18	61,11%	100,00%
Process	37	57	64,91%	100,00%
Outputs	9	15	60,00%	100,00%
Outcomes	10	12	83,33%	100,00%
Total	87	123	70,73%	100,00%

Kondisi Nilai Penting

Nilai Penting	Kondisi	Tren
Vegetasi savana	Baik	Stabil
Banteng	Baik	Stabil
Macan Tutul	Baik	Meningkat
Hutan Dataran Rendah	Baik	Stabil
Hutan Jati	Baik	Meningkat

Status dan Tren Indikator Spesies Kunci

Species	Range	Population size	Pop process	Habitat area
banteng	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
macan tutul	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
ajag	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
bebi kuli	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
0	0	0	0	0

Status dan Tren Habitat

Key habitats	Range	Area of habitat	Structure and function	Extent of threats
Savana	Meningkat	Stabil	Membaik	Stabil
Dataran rendah	Stabil	Stabil	Membaik	Stabil
Tanumbu karang	Stabil	Stabil	Stabil	Stabil
Hutan Pantai	Stabil	Stabil	Stabil	Stabil
0	0	0	0	0

Gambar 24. Nilai METT Balai TN Baluran

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi telah berjalan efektif, didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang konsisten, penguatan pengawasan dan perlindungan kawasan, serta meningkatnya koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pencapaian ini juga menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan kawasan di tingkat UPT.

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Target Indikator Kinerja Kegiatan jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif ditetapkan secara kumulatif selama periode lima tahunan Renstra. Pada tahun 2025 capaian indikator menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan TN Baluran telah berada pada jalur pencapaian target lima tahunan Renstra. Status pengelolaan efektif yang telah dicapai Balai TN Baluran menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra.

Pencapaian awal dalam periode Renstra ini mencerminkan efektivitas implementasi perencanaan pengelolaan kawasan, pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan yang mengacu pada standar penilaian efektivitas pengelolaan kawasan (METT). Capaian tersebut berkontribusi langsung terhadap akumulasi capaian lima tahunan yang ditargetkan.

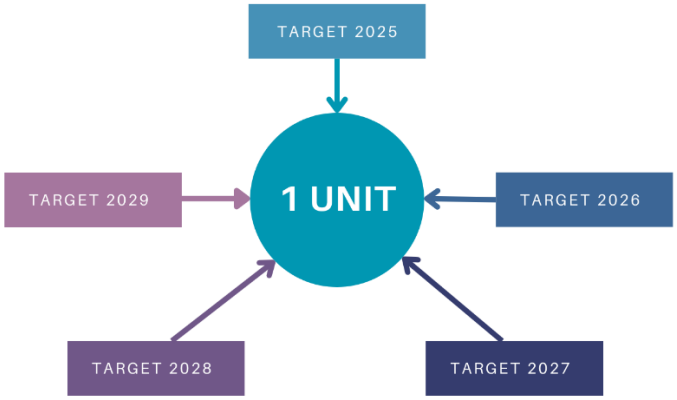

Gambar 25. Target Nilai Maturitas SPIP tahun 2025 - 2029

Meskipun capaian saat ini telah mendukung pemenuhan target lima tahunan, keberlanjutan pencapaian indikator ini tetap memerlukan penguatan upaya pengelolaan kawasan secara konsisten dan adaptif. Tantangan berupa keterbatasan sumber daya, dinamika tekanan terhadap kawasan, serta risiko gangguan ekosistem perlu dikelola secara sistematis agar capaian efektivitas pengelolaan kawasan dapat dipertahankan dan ditingkatkan hingga akhir periode Renstra.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja hingga tahun pelaporan telah selaras dengan target lima tahunan Renstra Balai Taman Nasional Baluran dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan.

Gambar 26. Pemadaman kebakaran hutan di Savana

Analisis Capaian terhadap

Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan berkelanjutan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan kawasan yang telah dilaksanakan mampu mempertahankan status efektivitas pengelolaan kawasan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberlanjutan capaian indikator ini juga didukung oleh semakin optimalnya koordinasi antar unit kerja serta meningkatnya kapasitas aparatur pengelola kawasan dalam menerapkan standar pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Selain itu, pengalaman pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan pada tahun sebelumnya telah menjadi dasar pembelajaran dalam memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kinerja pada tahun 2025.

Meskipun demikian, capaian yang relatif stabil dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan masih perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi dinamika tekanan terhadap kawasan dan keterbatasan sumber daya. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja pada tahun 2025 telah sejalan dengan capaian tahun sebelumnya dan mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Taman Nasional Baluran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Benchmarking

Balai Besar KSDA Jawa Timur
1 Unit

Balai Taman Nasional Alas Purwo
1 Unit

Balai Taman Nasional Meru Betiri
1 Unit

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif, target yang ditetapkan untuk seluruh UPT dilingkup Ditjen KSDAE adalah 1 Unit. Namun demikian prioritas kegiatan dan permasalahan yang dihadapi setiap UPT berbeda-beda sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing kawasan.

Upaya dan Kendala

Upaya

1. Penguatan perencanaan pengelolaan kawasan, melalui penyusunan dan implementasi dokumen rencana pengelolaan kawasan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sesuai dengan tujuan dan fungsi kawasan.
2. Peningkatan efektivitas perlindungan dan pengamanan kawasan, melalui pelaksanaan patroli rutin, pengendalian gangguan kawasan, serta pemanfaatan teknologi pendukung pengamanan kawasan untuk menekan potensi ancaman terhadap keutuhan ekosistem.
3. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, melalui upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan kebakaran yang terintegrasi guna menjaga kondisi ekosistem kawasan tetap lestari.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur pengelola kawasan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan berbasis standar efektivitas pengelolaan.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan secara berkala, termasuk pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan menggunakan instrumen METT sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
6. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sekitar kawasan, dalam mendukung pengelolaan kawasan secara kolaboratif.

Gambar 27. Pemeriksaan terhadap aktivitas masyarakat di dalam kawasan

Kendala

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan seluruh komponen pengelolaan kawasan sesuai standar efektivitas pengelolaan.
2. Meningkatnya tekanan terhadap kawasan konservasi, seperti aktivitas ilegal dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang, yang memerlukan upaya pengamanan dan pengawasan ekstra.
3. Kondisi biofisik kawasan yang rentan terhadap gangguan, khususnya risiko kebakaran pada ekosistem savana dan hutan musim, yang mempengaruhi stabilitas pengelolaan kawasan.
4. Dinamika sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan, yang masih berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap sumber daya kawasan dan mempengaruhi efektivitas pengelolaan.
5. Kebutuhan pemenuhan bukti dukung dan proses verifikasi penilaian efektivitas, yang memerlukan koordinasi lintas unit dan waktu pelaksanaan yang tidak singkat.

Outcome

Terwujudnya pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran yang efektif, terukur, dan berkelanjutan, yang ditandai dengan terpenuhinya standar efektivitas pengelolaan kawasan (METT), meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan, serta terjaganya fungsi perlindungan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan kawasan secara lestari dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Pencapaian Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif

Pada tahun 2025 Target jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 2.680.775.000,-. Efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target ini diukur dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja yang dicapai. Realisasi anggaran untuk mendukung IKK ini pada tahun 2025 mencapai Rp 2.659.616.379,-, atau 99,21% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, capaian kinerja jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif pada Balai Taman Nasional Baluran pada tahun yang sama tercatat sebesar 100%.

Berdasarkan perhitungan efisiensi, nilai yang diperoleh adalah 0,99, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja Target jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif pada Balai Taman Nasional Baluran sangat efisien.

Rekomendasi

Rekomendasi peningkatan dan penguatan pencapaian IKK Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif pada Balai Taman Nasional Baluran :

1. Memperkuat konsistensi implementasi rencana pengelolaan kawasan, dengan memastikan seluruh kegiatan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan dan rencana kerja tahunan.
2. Meningkatkan kualitas penilaian dan tindak lanjut hasil METT, melalui pemenuhan bukti dukung yang lengkap serta pemanfaatan hasil penilaian sebagai dasar perbaikan berkelanjutan pengelolaan kawasan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pendukung pengelolaan kawasan, khususnya dalam kegiatan patroli, pemantauan, dan pengendalian gangguan kawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
4. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola kawasan, melalui peningkatan kompetensi teknis dan manajerial yang mendukung penerapan standar pengelolaan kawasan efektif.
5. Meningkatkan sinergi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar kawasan, guna menekan tekanan terhadap kawasan dan mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan.
6. Mengintegrasikan pengelolaan risiko dalam perencanaan kinerja, khususnya risiko kebakaran dan gangguan kawasan, agar pencapaian indikator kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Gambar 28. Patroli pengamanan bersama stakeholder terkait

IKK

Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

3 Kelompok	3 Kelompok	100%
TARGET JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA DALAM UPAYA KONSERVASI KAWASAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	CAPAIAN JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT YANG DIBINA DALAM UPAYA KONSERVASI KAWASAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati merupakan jumlah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang dibina Balai Taman Nasional Baluran melalui berbagai kegiatan guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Dalam tataran operasional kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB serta kegiatan bina cinta alam. Masyarakat yang dibina dan menjadi objek pengukuran dalam konteks kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TN Baluran atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi dan sumber daya alam di TN Baluran.

Masyarakat yang dibina dan menjadi objek pengukuran dalam konteks bina cinta alam, selain masyarakat setempat/sekitar KSA/KPA/TB, juga meliputi komponen masyarakat yang lebih luas. Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan yang menjadi objek pengukuran meliputi kegiatan terkait pemberian akses serta berbagai kegiatan terkait peningkatan kapasitas kepada kelompok masyarakat (seperti pembentukan kelompok, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, pemberian bantuan usaha ekonomi, dll) yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Baluran. Bentuk kegiatan bina cinta alam guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati yang menjadi objek pengukuran antara lain meliputi kegiatan Pembinaan Saka Wanabakti.

Analisis Capaian terhadap

Target Tahunan

Target Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati pada Balai Taman Nasional Baluran yang diperjanjikan untuk tahun 2025 ialah sebanyak 3 Kelompok Masyarakat. Target tersebut ditentukan menyesuaikan dengan target Nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2025. Target Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati pada Balai Taman Nasional Baluran di tahun 2025 mencapai 100% terhadap target.

Sepanjang tahun 2025, Balai TN Baluran berhasil merealisasikan indikator kinerja Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi melalui program anjangsana dan pembinaan intensif pada kelompok masyarakat (Pokmas Wahana Raya Merak Baluran, Kelompok Tani Hutan Baluran Makmur, dan Pokmas Banteng Afrika) di Desa Sumberwaru dan Wonorejo. Capaian ini diwujudkan melalui pendampingan teknis eradikasi spesies invasif Vachellia nilotica, fasilitasi alat ekonomi produktif berbasis jasa lingkungan, serta penguatan kelembagaan kelompok masyarakat guna menekan ketergantungan ilegal terhadap kawasan dan memastikan keberlanjutan kemitraan konservasi.

Pada tahun yang bersamaan, pencapaian Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB didukung melalui kaderisasi generasi muda melalui Pramuka Saka Wanabakti yang melaksanakan aksi perlindungan ekosistem dan monitoring keanekaragaman hayati secara partisipatif. Melalui rangkaian pelatihan identifikasi spesies prioritas di Pantai Bama dan analisis vegetasi di Hutan Evergreen, kegiatan ini tidak hanya mendukung pemutakhiran data informasi hayati kawasan, tetapi juga memperkuat pilar perlindungan kawasan dari gangguan anorganik (sampah) di jalur wisata utama guna menjamin integritas ekologis Taman Nasional Baluran.

Gambar 29. Pendampingan Kelompok Masyarakat Mitra Ternak Baluran

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Target Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati merupakan jumlah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang dibina Balai Taman Nasional Baluran. Target tersebut pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 diharapkan dapat mencapai sebanyak 12 Kelompok Masyarakat secara komulatif hingga tahun 2029. Rincian target tahun seperti tercantum dapat gambar di bawah ini.

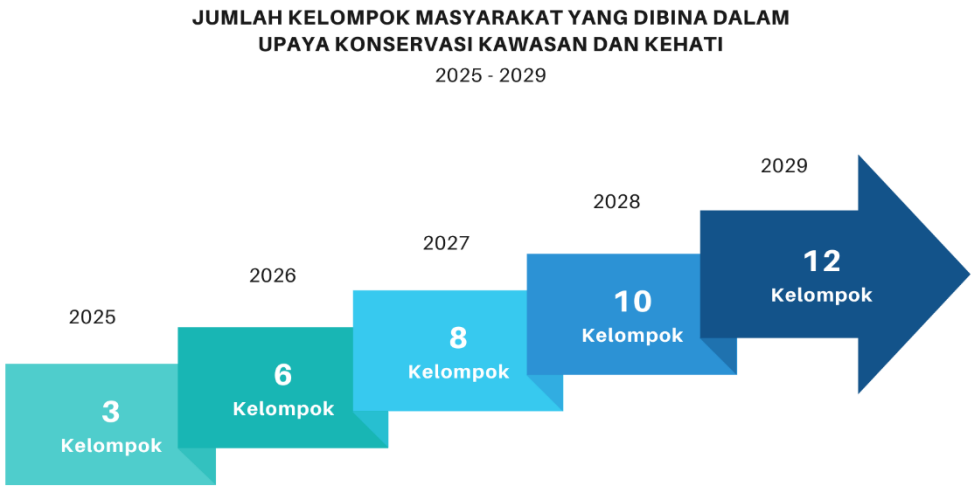

Gambar 30. Grafik target Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina tahun 2025 - 2029

Pada awal periode Renstra 2025-2029 Balai Taman Nasional Baluran telah berhasil mencapai target sebanyak 3 Kelompok Masyarakat. Memperhatikan bahwa target IKK ini merupakan target yang bersifat komulatif, maka selain menambah target kelompok baru pada tahun berikutnya, kelompok masyarakat sebelumnya tetap harus mendapatkan pendampingan, pembinaan dan kegiatan lainnya secara berkelanjutan.

Gambar 31. Pendampingan Kelompok Masyarakat Banteng Afrika

Analisis Capaian terhadap

Tahun Sebelumnya

Capaian IKK Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2024. Peningkatan tersebut tercermin dari terpenuhinya target pembinaan kelompok masyarakat yang dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terencana. Pada Tahun 2025, pembinaan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan jumlah kelompok masyarakat, tetapi juga diarahkan pada penguatan peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan konservasi di tingkat tapak.

Dibandingkan dengan Tahun 2024, pelaksanaan pembinaan pada Tahun 2025 menunjukkan perbaikan dalam koordinasi, pendampingan, dan pemantauan kelompok masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi dan menjadi dasar penguatan pembinaan kelompok masyarakat pada tahun berikutnya.

Benchmarking

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
5 Kelompok

Balai Taman Nasional Karimun Jawa
3 Kelompok

Balai Taman Nasional Meru Betiri
3 Kelompok

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan kelompok masyarakat serta memastikan keselarasan pelaksanaan IKK dengan praktik terbaik (best practices), Balai Taman Nasional Baluran melakukan benchmarking terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yang berada di wilayah Jawa, antara lain Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Balai Taman Nasional Karimunjawa, dan Balai Taman Nasional Meru Betiri.

Hasil benchmarking menunjukkan bahwa UPT yang memiliki capaian pembinaan kelompok masyarakat yang optimal menerapkan pendekatan pembinaan yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kemitraan. Pembinaan tidak hanya difokuskan pada aspek jumlah kelompok, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pemahaman konservasi, serta keterlibatan aktif kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan.

Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango menerapkan model pembinaan kelompok masyarakat berbasis zonasi dan fungsi kawasan, sehingga kegiatan kelompok masyarakat dapat diselaraskan dengan rencana pengelolaan kawasan. Sementara itu, Balai TN Karimunjawa mengintegrasikan pembinaan kelompok masyarakat dengan pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam, yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung upaya konservasi. Balai TN Meru Betiri menekankan penguatan kemitraan konservasi dan monitoring partisipatif sebagai bagian dari pembinaan kelompok masyarakat di sekitar kawasan.
Dibandingkan dengan praktik tersebut, pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat di Balai TN Baluran Tahun 2025 telah menunjukkan keselarasan dalam hal pemenuhan target jumlah kelompok masyarakat yang dibina. Namun demikian, hasil benchmarking menunjukkan perlunya penguatan aspek keberlanjutan pembinaan dan peningkatan peran kelompok masyarakat dalam mendukung pencapaian outcome konservasi.

Benchmarking ini menjadi dasar bagi Balai TN Baluran untuk menyempurnakan strategi pembinaan kelompok masyarakat pada tahun berikutnya, khususnya melalui penguatan kemitraan konservasi, peningkatan kapasitas kelompok, serta integrasi pembinaan masyarakat dengan program konservasi dan pemanfaatan kawasan secara lestari.

Upaya dan Kendala

Upaya

1. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat.
   Dilakukan melalui fasilitasi pembentukan dan legalisasi kelompok masyarakat mitra konservasi (antara lain kelompok Masyarakat Mitra Polhut/MMP, kelompok jasa wisata alam, dan kelompok usaha berbasis hasil hutan bukan kayu), termasuk pendampingan dalam penyusunan anggaran dasar, rencana kerja, dan tata kelola organisasi.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
   Dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait konservasi, pengelolaan usaha produktif ramah lingkungan, jasa wisata alam, serta pengawasan dan perlindungan kawasan.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis konservasi.
   Difasilitasi melalui pengembangan usaha jasa wisata alam, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta kegiatan ekonomi alternatif lainnya yang sejalan dengan prinsip konservasi dan berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Peningkatan kemitraan dan kolaborasi multipihak.

Dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mendukung pembinaan, pendanaan, dan pemasaran produk kelompok masyarakat.

5. Pendampingan berkelanjutan dan monitoring evaluasi.
   Dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan kelompok masyarakat, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kontribusi kelompok masyarakat terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

Kendala

1. Keterbatasan kapasitas dan literasi kelompok masyarakat.
   Sebagian kelompok masyarakat masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait konservasi, tata kelola kelembagaan, serta pengelolaan usaha yang berkelanjutan.
2. Keterbatasan sumber daya pendampingan.
   Jumlah dan sebaran sumber daya manusia pendamping, baik dari aparatur maupun mitra, belum sepenuhnya sebanding dengan luas kawasan konservasi dan jumlah kelompok masyarakat yang dibina.
3. Akses permodalan dan pasar yang belum optimal.
   Kelompok masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, serta jaringan pemasaran, sehingga usaha ekonomi produktif belum berkembang secara optimal.
4. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
   Sebagian kelompok masyarakat masih menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah dan cenderung bergantung pada fasilitasi dan dukungan pemerintah.
5. Dinamika sosial dan konflik kepentingan.
   Masih terdapat potensi konflik kepentingan antar kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan pengelola kawasan, yang memerlukan pendekatan persuasif dan berkelanjutan.

Outcome

Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat diharapkan menghasilkan outcome sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan kapasitas kelompok masyarakat sehingga kelompok masyarakat mampu mengelola kegiatan konservasi dan usaha produktif secara berkelanjutan, dengan tata kelola yang lebih baik dan kepatuhan terhadap ketentuan konservasi.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui keterlibatan aktif masyarakat berkontribusi pada pengurangan tekanan dan gangguan kawasan serta peningkatan pengawasan dan perlindungan kawasan.

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pengembangan usaha berbasis konservasi yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi kawasan.
4. Terbangunnya kemitraan multipihak yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara pengelola kawasan, masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra lainnya untuk mendukung keberlanjutan program pembinaan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Target Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Untuk mencapai target IKK ini, dukungan sumber daya anggaran yang ada sangat terbatas. Pada tahun 2025 Target Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati hanya didukung melalui RO Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati yang besarannya Rp 6.000.000,. Efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target ini diukur dengan membandingkan realisasi anggaran RO tersebut terhadap capaian kinerja yang dicapai. Realisasi anggaran RO Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati pada tahun 2025 mencapai Rp 6.000.000,-, atau 100% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, capaian kinerja Target Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati pada Balai Taman Nasional Baluran pada tahun yang sama tercatat sebesar 100%.

Gambar 32. Pelantikan Anggota Baru Saka Wanabakti

Berdasarkan perhitungan efisiensi, nilai yang diperoleh adalah 1, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja Target Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati pada Balai Taman Nasional Baluran sangat efisien. Efisiensi penggunaan anggaran tidak hanya terlihat dari realisasi yang mencapai 100% dari pagu, tetapi juga dari capaian kinerja yang sesuai dengan target yanng diharapkan. Keberhasilan ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi tugas dan fungsi setiap elemen pejabat fungsional yang ada Balai Taman Nasional Baluran, khususnya dalam hal pencapaian target IKK ini adalah pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan.

Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan program, rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan indikator kinerja berbasis outcome dengan mengarahkan pembinaan kelompok masyarakat tidak hanya pada jumlah kelompok yang dibina, tetapi pada tingkat kemandirian, keberlanjutan usaha, dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran.
2. Peningkatan kualitas pendampingan berbasis wilayah dengan mengoptimalkan peran Polhut, Penyuluh Kehutanan, serta mitra pendamping melalui penugasan berbasis prioritas kawasan dan kelompok strategis.
3. Integrasi pembinaan kelompok masyarakat dalam perencanaan kinerja melalui integrasi program pembinaan kelompok masyarakat ke dalam cascaded IKU Balai Taman Nasional Baluran untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi melalui pengembangan mekanisme monev yang terukur dan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian outcome dan dampak jangka panjang.

Gambar 33. Pendampingan Kelompok Masyarakat Wahana Raya merak Baluran

IKK
Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB

3,35 Milyar	5,02 Milyar	150%
TARGET NILAI PNBP DARI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KSA, KPA DAN TB	CAPAIAN NILAI PNBP DARI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KSA, KPA DAN TB	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Indikator ini mengukur tingkat peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. Pada Balai Taman Nasional Baluran PNBP pemanfaatan jasa lingkungan terdiri atas iuran dan pungutan dari wisata alam. Tarifnya telah diatur dalam peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang terkait, dan pembayaran dilakukan oleh pihak yang melakukan pemanfaatan, seperti perusahaan atau pengunjung wisata. PNBP dalam hal ini adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber data utama pengukuran capaian indikator ini berasal dari iuran dan pungutan pemanfaatan jasa lingkungan. Data capaian indikator ini bersumber dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), dengan beberapa akun penerimaan negara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

Analisis Capaian terhadap
Target Tahunan

Pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Kepala Balai TN Baluran untuk IKK Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB adalah sebesar Rp. 3.551.100.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan data SIMPONI pada tahun 2025, PNBP Balai TN Baluran sebesar Rp.5.028.461.000,00 dengan rincian yaitu dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp.3.351.100.000,00. Setelah dilakukan pengolahan data pungutan dan iuran pemanfaatan jasa lingkungan maka capaian Balai TN Baluran untuk IKK Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB adalah sebesar 150%.

Tabel 5. Jumlah PNBP Balai TN Baluran per bulan

No	Bulan	Jumlah PNBP	
1	Januari	Rp.	217.505.000,00
2	Februari	Rp.	214.187.000,00
3	Maret	Rp.	51.898.000,00
4	April	Rp.	825.775.000,00
5	Mei	Rp.	458.408.000,00
6	Juni	Rp.	646.792.000,00
7	Juli	Rp.	462.332.000,00
8	Agustus	Rp.	292.791.000,00
9	September	Rp.	460.454.000,00
10	Oktober	Rp.	344.238.000,00
11	November	Rp.	306.307.000,00
12	Desember	Rp.	747.774.000,00
Total		Rp.	5.028.461.000,00

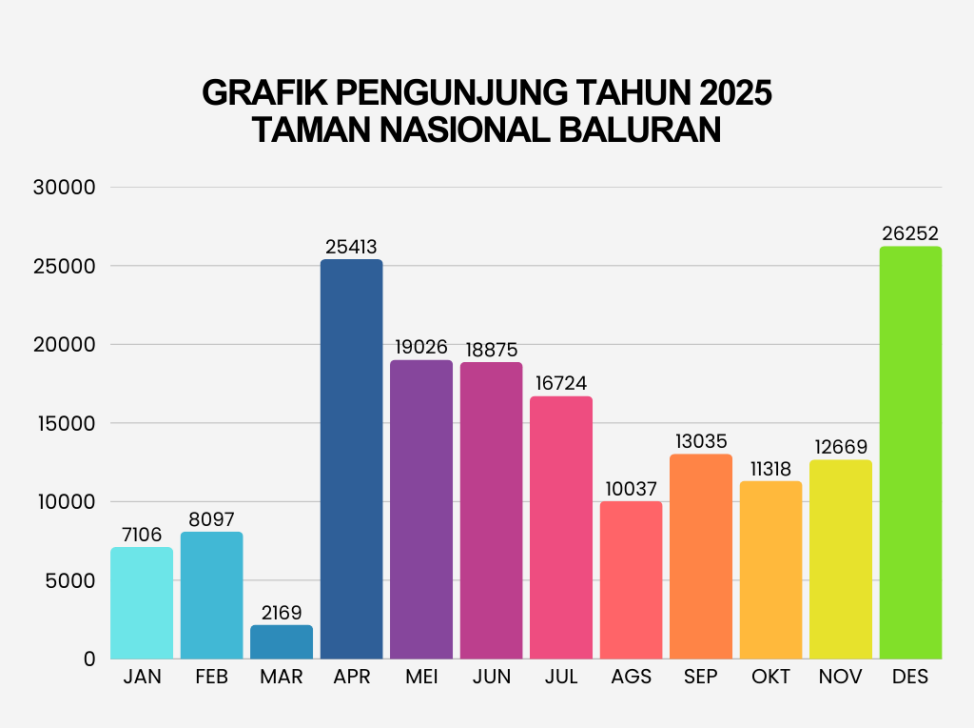

Gambar 34. Grafik jumlah Pengunjung bulanan

Dari uraian data di atas total jumlah pengunjung wisata di TN Baluran di tahun 2025 adalah sebanyak 172.846 orang. Jumlah pengunjung tersebut didominasi oleh Pengunjung Nusantara dengan jumlah total sebanyak 170.102 orang sedangkan pengunjung Manca Negara sebanyak 2.734 orang. Pada tahun 2025 puncak kunjungan wisata di TN Baluran terjadi pada bulan April dan Desember. Hal ini disebabkan pada bulan tersebut merupakan bulan dengan hari libur yang cukup panjang. Pada bulan April merupakan musimm libur Hari Raya Idul Fitri dan pada bulan Desember merupakan musim libur Hari Natal dan Tahun Baru.

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB telah tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 mulai dari tingkat Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan hingga tingkat UPT dalam hal ini Balai TN Baluran dimana pada tahun 2025 capaian Balai TN Baluran telah melebihi target yang ditetapkan. Dari data target tahunan mulai 2025 hingga 2029, setiap tahun target capaian PNBP selalu meningkat dengan persentase peningkatan yang beragam dari target tahun sebelumnya. Perlu adanya upaya dan strategi yang terukur agar seluruh target tersebut hingga akhir periode Renstra Tahun 2025-2029 dapat tercapai.

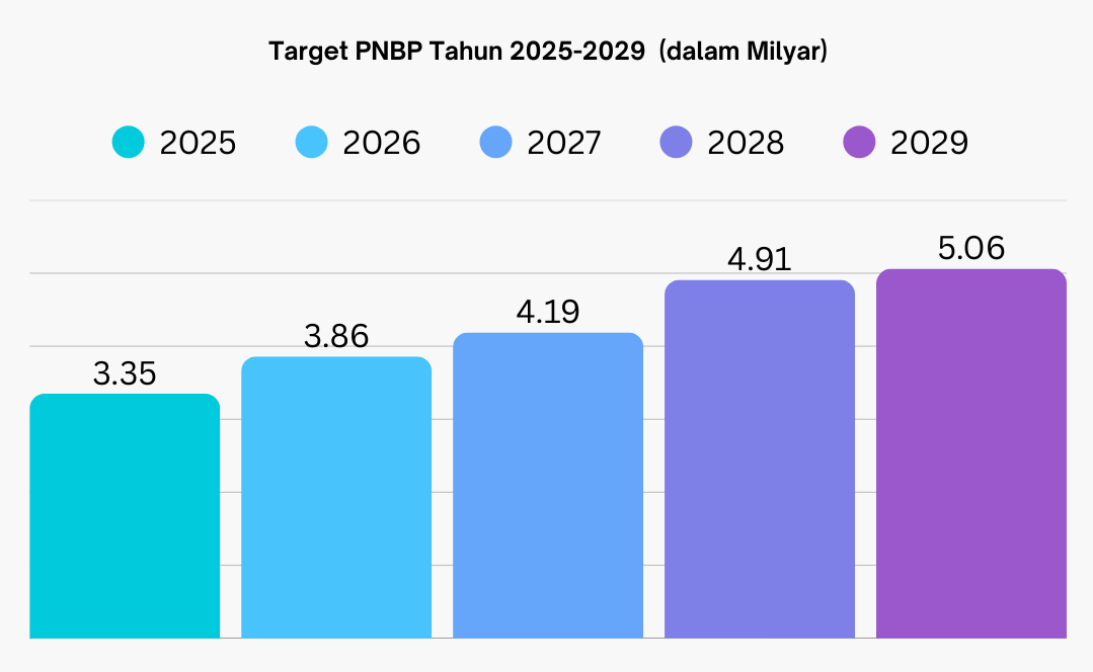

Gambar 35. Grafik target PNBP tahun 2025 - 2029

Analisis Capaian terhadap

Tahun Sebelumnya

Pencapaian Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan merupakan IKK yang menjadi target dalam Rencana Strategis 2025 – 2029 dan pada tahun 2025 ini menjadi tahun pertama dalam implementasi di setiap UPT. Namun demikian aktivitas pemanfaatan jasa lingkungan dalam hal ini kegiatan wisata alam di TN Baluran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan kawasan selain kegiatan perlindungan dan pengawetan.

Apabila disandingkan pada data kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan melalui aktivitas wisata alam di tahun 2024, pada tahun 2025 telah terjadi peningkatan sebesar 2,35%.

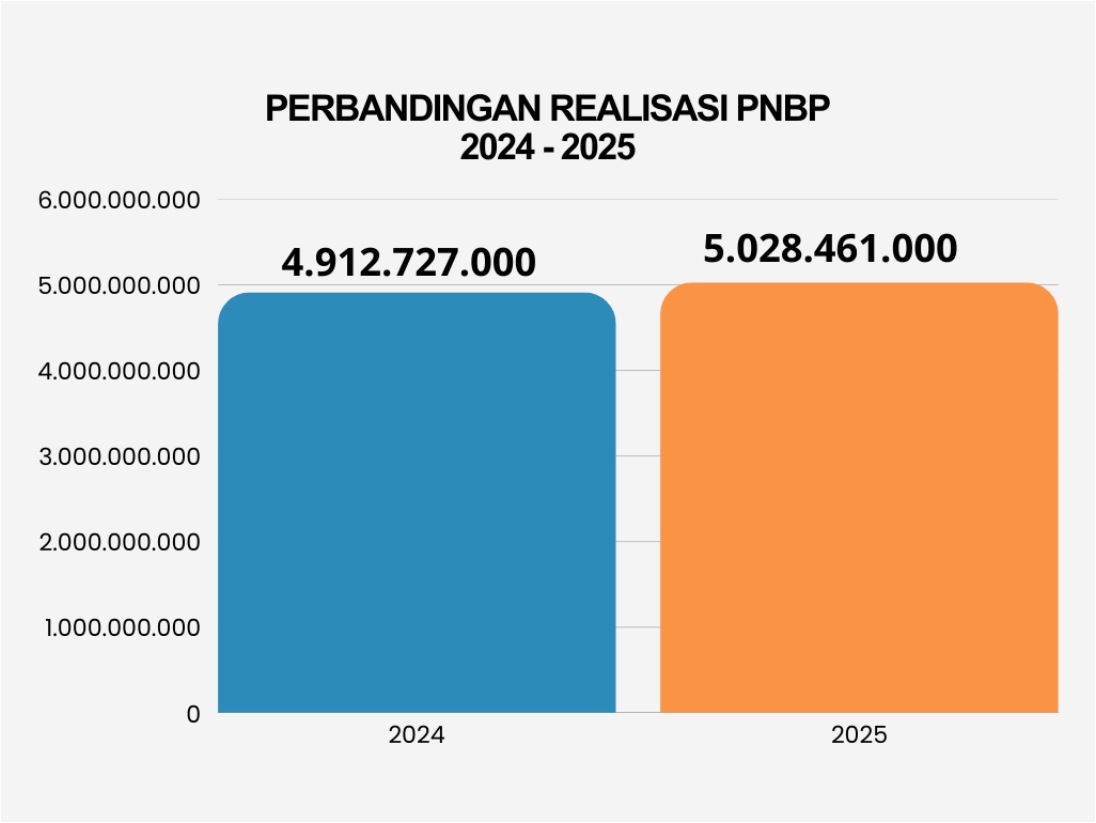

Gambar 36. Grafik perbandingan realisasi PNBP tahun 2024 – 2025

Benchmarking

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
22,4 Milyar
(Tahun 2024)

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
9,6 Milyar
(Tahun 2025)

Dalam upaya meningkatkan pencapaian IKK Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan, Balai TN Baluran melaksanakan benchmarking melalui studi literatur dan analisis data sekunder terhadap beberapa UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, yaitu Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru dan Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango. Kedua UPT tersebut dipilih karena memiliki kinerja PNBP yang relatif tinggi dan konsisten dibandingkan UPT lain di wilayah yang sama.

Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru menunjukkan capaian PNBP yang signifikan, terutama bersumber dari pemanfaatan jasa wisata alam unggulan yang dikelola secara intensif dan didukung oleh penerapan sistem e-ticketing serta pengaturan kuota kunjungan. Adapun Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango menunjukkan capaian PNBP yang terus meningkat, didukung oleh pengelolaan wisata alam yang terarah, penguatan kemitraan, dan peningkatan kualitas layanan pengunjung.

Hasil benchmarking tersebut menunjukkan bahwa capaian PNBP yang optimal didukung oleh pengelolaan jasa lingkungan yang terencana, diversifikasi sumber PNBP, penerapan sistem pemungutan yang transparan, serta penguatan pengawasan pemanfaatan kawasan. Praktik baik dari UPT rujukan tersebut menjadi referensi bagi Balai Taman Nasional Baluran dalam memperkuat strategi pengelolaan jasa lingkungan guna mendorong peningkatan nilai PNBP secara berkelanjutan dan mendukung pencapaian kinerja pengelolaan kawasan konservasi.

Gambar 37. Salah satu aktivitas wisata alam di Taman Nasional Baluran

Upaya dan Kendala

Upaya

Dalam rangka meningkatkan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa wisata alam di kawasan Taman Nasional Baluran, telah dilakukan berbagai upaya strategis yang berfokus pada penguatan tata kelola pemanfaatan jasa lingkungan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Upaya yang telah dilakukan meliputi pengimplementasian digitalisasi layanan wisata alam melalui penerapan sistem e-ticketing dan pembayaran non-tunai pada pintu masuk kawasan Taman Nasional Baluran. Digitalisasi ini memberikan kemudahan bagi pengunjung, meningkatkan akurasi pencatatan jumlah pengunjung, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan PNBP wisata alam.

Upaya peningkatan nilai PNBP juga dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan destinasi wisata alam dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung, penataan jalur wisata, serta peningkatan standar pelayanan pengunjung. Peningkatan kualitas layanan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan Taman Nasional Baluran sebagai destinasi wisata alam unggulan tanpa mengabaikan prinsip konservasi.

Selanjutnya, upaya peningkatan nilai PNBP wisata alam juga didukung melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dalam penyediaan jasa wisata alam. Melalui pembinaan kelompok jasa wisata dan kemitraan pengelolaan, diharapkan tercipta sinergi antara peningkatan ekonomi masyarakat dan optimalisasi penerimaan negara.

Gambar 38. Penyegaran Pemandu Wisata Alam Taman Nasional Baluran

Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja, Taman Nasional Baluran secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi PNBP wisata alam. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan, peningkatan efektivitas pemungutan, serta penguatan sistem pengelolaan PNBP berbasis kinerja.

"Balai Taman Nasional Baluran berkomitmen untuk meningkatkan nilai PNBP dari jasa wisata alam secara berkelanjutan, sejalan dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik."

Kendala

Dalam pelaksanaan upaya peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa wisata alam, Balai Taman Nasional Baluran masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pemungutan PNBP di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya penerapan sistem e-ticketing dan pembayaran non-tunai di seluruh pintu masuk kawasan, sehingga proses pemungutan PNBP masih dilakukan secara konvensional di beberapa lokasi. Selain itu, tingkat pemahaman dan kepatuhan pengunjung terhadap kewajiban pembayaran PNBP masih belum merata.

Kendala lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia pengelola kawasan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, khususnya dalam pengelolaan layanan wisata alam dan administrasi PNBP. Beban tugas pengelola kawasan yang cukup tinggi, terutama pada musim kunjungan, turut mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pengendalian pemungutan PNBP di lapangan.

Dari aspek pengelolaan kawasan, pengendalian jumlah kunjungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung kawasan juga menjadi tantangan tersendiri. Pada kawasan Taman Nasional yang memiliki daya tarik tinggi, pembatasan kunjungan demi menjaga kelestarian ekosistem berimplikasi pada terbatasnya peningkatan volume pengunjung, yang secara langsung mempengaruhi potensi peningkatan nilai PNBP.
Selain itu, keterbatasan anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana wisata alam berdampak pada belum meratanya kualitas layanan di seluruh kawasan Taman Nasional. Kondisi ini dapat mempengaruhi minat kunjungan wisatawan dan berdampak pada fluktuasi penerimaan PNBP.
Koordinasi lintas pihak, baik dengan pemerintah daerah, pelaku usaha wisata, maupun masyarakat sekitar kawasan, juga masih memerlukan penguatan. Perbedaan pemahaman terhadap mekanisme pemungutan PNBP dan peran masing-masing pihak berpotensi menimbulkan kendala dalam optimalisasi penerimaan negara dari jasa wisata alam.

"Berbagai kendala menjadi bahan evaluasi bagi Balai Taman Nasional Balurn untuk merumuskan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja PNBP jasa wisata alam secara berkelanjutan."

Outcome

Outcome (hasil/dampak) dari penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) wisata alam dari kawasan Taman Nasional Baluran yang mencakup aspek fiskal, konservasi, pelayanan, hingga pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Kontribusi terhadap Penerimaan Negara
   PNBP dari tiket masuk dan pemanfaatan jasa wisata alam di kawasan Taman Nasional Baluran secara langsung meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. PNBP ini menjadi sumber pembiayaan negara yang tidak berasal dari pajak dan menjadi bagian dari target pendapatan nasional.
2. Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi
   Pendapatan dari PNBP dipakai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan dan layanan wisata:
   - Mendukung pengelolaan fasilitas dan infrastruktur wisata alam agar lebih nyaman dan aman bagi pengunjung.
   - Mendorong implementasi sistem digital (mis. e-ticketing) untuk transparansi dan kemudahan akses layanan sekaligus monitoring pemasukan. Melalui peningkatan tata kelola, diharapkan pengunjung mendapatkan pengalaman wisata yang selaras dengan prinsip konservasi.

3. Dukungan untuk Konservasi Alam
   PNBP dari wisata alam juga punya dampak tidak langsung pada konservasi sumber daya alam. Dana ini membantu biaya pengawasan, perlindungan habitat, pemeliharaan ekosistem, dan rehabilitasi lingkungan di dalam kawasan Taman Nasional.
4. Pemberdayaan dan Keterlibatan Komunitas Lokal
   PNBP turut memicu kegiatan sosialisasi kepada pelaku jasa wisata lokal tentang tarif dan kewajiban PNBP. Keterlibatan masyarakat sekitar dalam penyediaan jasa wisata, yang pada gilirannya meningkatkan potensi ekonomi lokal.
5. Meningkatkan Tata Kelola dan Kepatuhan
   Pengelolaan PNBP mendorong Sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik (akuntabilitas dan transparansi) serta penertiban dan penegakan aturan (mengurangi praktik tidak membayar tiket yang bisa merugikan potensi PNBP).

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Pencapaian Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB

Secara khusus IKK ini tidak didukung melalui alokasi pendanaan yang tersedia dalam DIPA Balai Taman Nasional Baluran di tahun anggaran 2025. Meskipun demikian, kegiatan wisata alam mulai dari pelayanan pengunjung hingga terpeliharanya sarana prasarana pendukung telah menjadi tugas melekat yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian IKK ini dapat terlaksana dengan sangat efisien.

Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa wisata alam di kawasan Taman Nasional Baluran, perlu dilakukan penguatan tata kelola pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan. Optimalisasi PNBP tidak hanya diarahkan pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan kawasan dan peningkatan kualitas pengelolaan konservasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola PNBP Wisata Alam
   Perlu dilakukan penyempurnaan tata kelola PNBP jasa wisata alam melalui standarisasi proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PNBP di seluruh unit pengelola Taman Nasional. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.
2. Optimalisasi Digitalisasi Layanan Wisata
   Penerapan sistem e-ticketing dan pembayaran non-tunai perlu diperluas dan diintegrasikan secara menyeluruh pada seluruh pintu masuk kawasan Taman Nasional. Digitalisasi layanan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PNBP, menyediakan data kunjungan yang akurat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan kawasan konservasi.
3. Penyesuaian Tarif Berbasis Daya Dukung Kawasan
   Penetapan tarif PNBP wisata alam perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan, jenis aktivitas wisata, serta tingkat sensitivitas ekosistem. Penyesuaian tarif yang berkeadilan dan proporsional diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan PNBP dan keberlanjutan sumber daya alam.
4. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan
   Pengelolaan jasa wisata alam perlu melibatkan masyarakat sekitar kawasan melalui kemitraan dan pembinaan usaha jasa wisata. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi lokal sekaligus memperkuat dukungan terhadap upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
   Monitoring dan evaluasi kinerja PNBP jasa wisata alam perlu dilakukan secara berkala dengan indikator yang terukur, seperti rasio realisasi PNBP terhadap potensi, PNBP per pengunjung, serta tingkat kepuasan pengunjung. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Balai Taman Nasional Baluran.

"Diharapkan pengelolaan PNBP jasa wisata alam di kawasan Taman Nasional Baluran dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara dan pencapaian tujuan konservasi sumber daya alam dan ekosistem"

IKK

Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment*

10 Persen	100 Persen	150%
TARGET PERSENTASE PINTU MASUK OBYEK WISATA YANG MENERAPKAN E-TICKETING DAN CASHLESS PAYMENT	CAPAIAN PERSENTASE PINTU MASUK OBYEK WISATA YANG MENERAPKAN E-TICKETING DAN CASHLESS PAYMENT	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Penerapan e-ticketing dan cashless payment dimaksud dalam hal ini adalah layanan masuk dan berkegiatan bagi pengunjung obyek wisata di Taman Nasional Baluran secara digital dan daring, melalui sebuah platform digital yang disiapkan "Sobat Banteng". Batasan pengukuran dilakukan terhadap seberapa banyak pintu masuk obyek wisata alam yang telah menerapkan e-ticketing dan cashless payment dimaksud.

Analisis Capaian terhadap

Target Tahunan

Pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Kepala Balai Taman Nasional Baluran untuk IKK Perentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment adalah sebesar 10%. Dari target tersebut Balai TN Baluran dapat memperoleh capaian sebesar 100% (seluruh pintu masuk) dengan artian tingkat capaian untuk tahun 2025 sebesar 150%.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) *Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment* merupakan salah satu indikator yang ditetapkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan wisata alam, transparansi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan tata kelola pemanfaatan jasa lingkungan di Balai Taman Nasional Baluran. Indikator ini diarahkan untuk mendorong transformasi layanan berbasis digital yang sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan monitoring pada akhir tahun anggaran, penerapan sistem e-ticketing dan cashless payment telah dilaksanakan pada pintu masuk obyek wisata utama yang dikelola oleh Balai TN Baluran yaitu pintu masuk Batangan, Watunumpuk dan Perengan. Implementasi tersebut mencakup penggunaan sistem pembayaran non-tunai serta pencatatan tiket masuk secara elektronik sebagai bagian dari penguatan sistem administrasi dan akuntabilitas penerimaan.

Gambar 39. Pembayaran tiket masuk dengan menggunakan QRis

Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan. Penerapan e-ticketing (dengan menggunakan aplikasi Sobat Banteng) dan cashless payment (dengan menggunakan layanan Qris) secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelayanan kepada pengunjung, meminimalkan potensi kebocoran PNBP, serta mendukung penyediaan data kunjungan yang lebih akurat dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Keberhasilan ini menjadi fondasi awal dalam pengembangan layanan wisata alam berbasis digital secara berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) *Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment* merupakan bagian dari target kinerja lima tahunan Balai Taman Nasional Baluran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025–2029. Indikator ini dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam melalui digitalisasi layanan, penguatan transparansi PNBP, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan kawasan konservasi.

Pada Tahun 2025 sebagai tahun awal periode RENSTRA, Balai Taman Nasional Baluran telah melaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi target lima tahunan indikator tersebut. Implementasi e-ticketing dan sistem pembayaran non-tunai (cashless payment) pada pintu masuk obyek wisata utama menjadi bentuk pemenuhan tahapan awal (baseline) pencapaian RENSTRA. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan indikator berada pada jalur yang sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

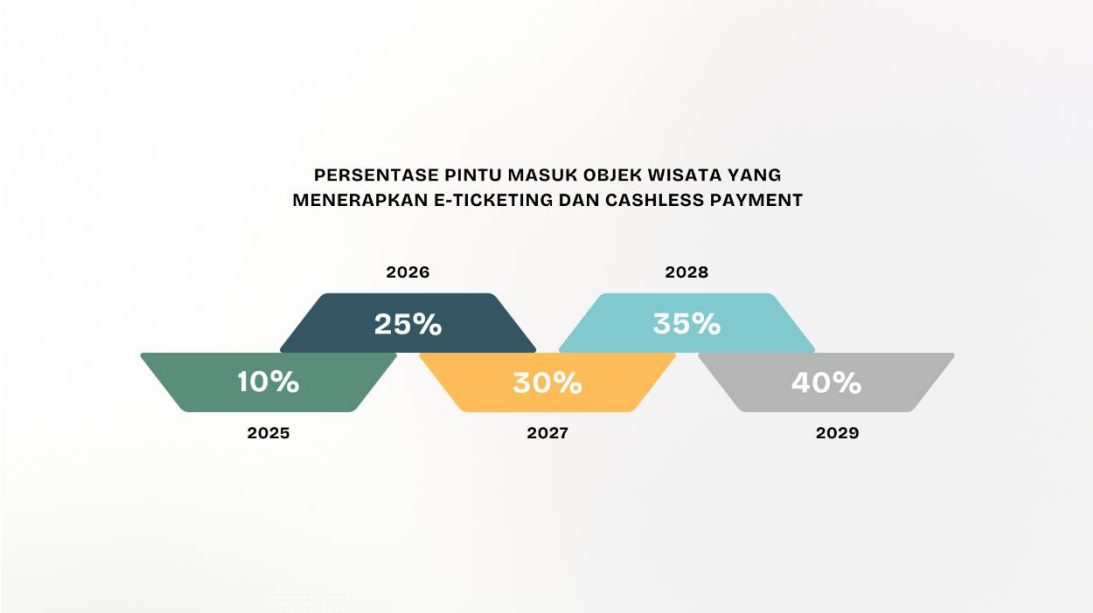

Gambar 40. Target IKK Eticketing dan Cashless payment tahun 2025 - 2029

Realisasi capaian pada tahun berjalan memberikan kontribusi positif terhadap progres pencapaian target kumulatif lima tahunan. Selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan wisata, penerapan sistem digital ini juga memperkuat sistem pengendalian internal, mendukung ketertiban administrasi, serta menyediakan data

kunjungan yang lebih andal sebagai dasar evaluasi dan perencanaan pengelolaan wisata alam ke depan.

Dengan demikian, capaian IKK *Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment* sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang selaras dengan target RENSTRA 2025–2029. Capaian ini menjadi landasan yang memadai untuk peningkatan cakupan dan kualitas penerapan sistem digital pada pintu masuk obyek wisata lainnya pada tahun-tahun berikutnya, guna memastikan tercapainya target lima tahunan secara optimal dan berkelanjutan.

Analisis Capaian terhadap
Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, pelayanan wisata di Taman Nasional Baluran masih didominasi oleh sistem tiket konvensional dengan pencatatan manual serta mekanisme pembayaran yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.

Pada Tahun 2025, Balai Taman Nasional Baluran mulai menerapkan sistem e-ticketing dan cashless payment pada pintu masuk obyek wisata sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan tata kelola PNBP. Perubahan sistem ini merupakan lompatan kinerja (step change) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tidak hanya mengubah metode transaksi, tetapi juga memperbaiki sistem pencatatan, pengendalian, dan pelaporan kunjungan wisata secara lebih akurat dan transparan.

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, penerapan e-ticketing dan cashless payment pada Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan, efisiensi proses administrasi, serta peningkatan akuntabilitas penerimaan. Selain itu, sistem ini mendukung penyediaan data kunjungan secara real time yang belum tersedia pada tahun sebelumnya, sehingga memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pengelolaan wisata alam.

Dengan demikian, capaian IKK pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja yang nyata dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Implementasi e-ticketing dan cashless payment menjadi tonggak penting dalam transformasi layanan wisata di Taman Nasional Baluran, serta menjadi dasar pengembangan sistem pelayanan digital yang lebih terpadu dan berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya.

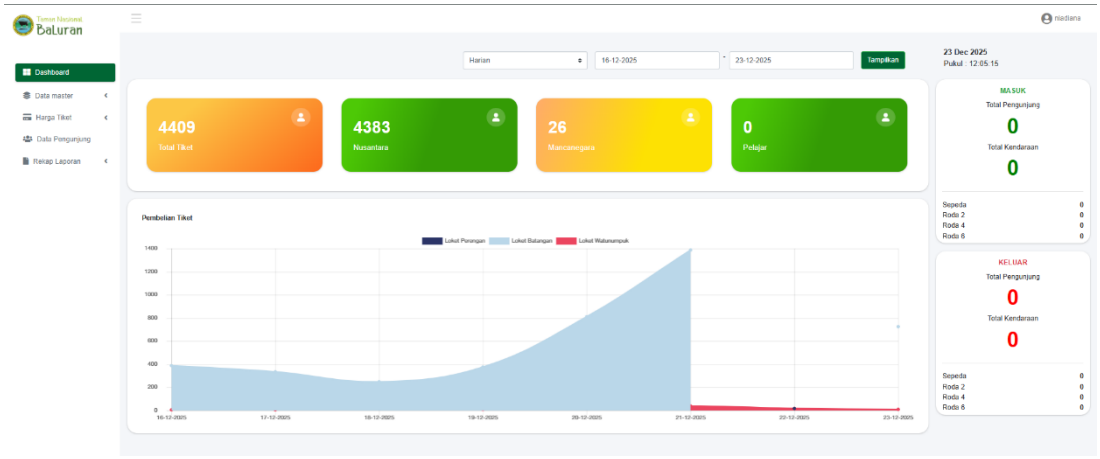

Gambar 41. Dashboard aplikasi eticketing Sobat Banteng

Benchmarking

Balai Besar KSDA Jawa Timur
10 Persen

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
10 Persen

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan wisata alam serta memperkuat tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Balai Taman Nasional Baluran melakukan benchmarking terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE dan pengelola kawasan konservasi lain yang telah menerapkan sistem e-ticketing dan cashless payment secara lebih awal dan konsisten.

Salah satu praktik baik (best practice) yang menjadi rujukan adalah penerapan e-ticketing dan pembayaran non-tunai pada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). UPT tersebut telah mengimplementasikan sistem tiket elektronik terintegrasi dengan kanal pembayaran digital pada seluruh pintu masuk utama kawasan wisata. Penerapan sistem tersebut terbukti meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat transparansi PNBP, serta menyediakan data kunjungan yang akurat dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan wisata.

Selain itu, Balai Besar KSDA Jawa Timur juga menjadi contoh dalam penerapan layanan wisata berbasis digital secara bertahap. Melalui penerapan e-ticketing pada destinasi wisata unggulan (TWA Kawah Ijen), pengelola mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung, menekan antrean di pintu masuk, serta memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan. Integrasi pembayaran non-tunai turut mendukung penguatan pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan jasa lingkungan.

Berdasarkan hasil benchmarking tersebut, Balai Taman Nasional Baluran mengadopsi prinsip-prinsip utama yang relevan, antara lain penerapan sistem pembayaran non-tunai yang mudah diakses, penyederhanaan alur pelayanan di pintu masuk, serta pemanfaatan data digital untuk mendukung monitoring dan evaluasi kinerja wisata alam. Implementasi e-ticketing dan cashless payment pada Tahun 2025 merupakan bentuk adaptasi terhadap praktik terbaik yang telah terbukti efektif di UPT lain.

Upaya dan Kendala

Upaya

1. Modernisasi Sistem Pembayaran dengan mengganti sistem tiket konvensional ke cashless payment melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard.
2. Pengembangan Aplikasi Terintegrasi (E-ticketing) Taman Nasional Baluran melalui platform “Sobat Banteng”.
3. Sosialisasi dan Pelatihan kepada petugas lapangan dan staf pengelola kawasan untuk memastikan pemahaman dan kesiapan operasional.
4. Dukungan Infrastruktur Teknis dengan menggandeng pihak perbankan untuk medapatkan dukungan teknis agar sistem dapat berjalan efektif di lapangan.

Kendala

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi yang berdampak pada pembayaran digital bisa terganggu atau tidak bisa dilakukan secara lancar, terutama untuk e-ticketing yang membutuhkan koneksi internet.
2. Adaptasi Pengunjung terhadap Teknologi terutama dari kalangan yang tidak familiar dengan teknologi digital sehingga mengalami kesulitan saat menggunakan sistem e-ticketing atau cashless payment, terutama jika tidak ada bantuan petugas atau panduan yang memadai.
3. Kesadaran dan Pemahaman Publik yang Masih Beragam. Masih diperlukan edukasi dan promosi aktif agar publik memahami dan menerima perubahan dari sistem tunai ke digital. Tanpa pemahaman yang cukup, pengunjung bisa kebingungan atau menolak sistem baru ini.
4. Isu Keamanan dan Kepercayaan. Keamanan data dan transaksi digital menjadi perhatian meskipun QRIS dan penyedia digital payment berstandar tinggi, potensi risiko seperti fraud, kebocoran data, atau kekhawatiran keamanan informasi tetap harus diantisipasi.
5. Kesenjangan Digital. Belum semua pengunjung memiliki smartphone, akses rekening bank atau keterampilan digital yang memadai, sehingga dapat memunculkan tantangan kesetaraan layanan.
6. Integrasi Sistem yang Kompleks. Pengembangan sistem e-ticketing membutuhkan integrasi antara platform digital, sistem back-end, dan berbagai penyedia layanan

pembayaran. Hal ini bisa menjadi tantangan teknis dan administratif, terutama jika melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Gambar 42. Sosialisasi penerapan Cashless payment di media sosial

Outcome

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan pengunjung kawasan konservasi
   - Proses pembelian tiket dan pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan terstandar.
2. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PNBP kawasan konservasi
   - Seluruh transaksi tercatat secara real time, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara.
3. Meningkatnya kualitas data kunjungan kawasan konservasi
   - Tersedianya data kunjungan yang akurat, terintegrasi, dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pengelolaan kawasan berbasis daya dukung.
4. Meningkatnya kepatuhan pengunjung terhadap ketentuan tarif dan mekanisme pembayaran resmi
   - Berkurangnya transaksi manual dan non-tunai yang tidak tercatat.
5. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan konservasi
   - Sistem pembayaran modern dan transparan meningkatkan citra layanan publik Balai Taman Nasional Baluran.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Pencapaian Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB

Secara khusus Pencapaian nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan di TN Baluran tidak didukung oleh anggaran dalam DIPA Tahun 2025. Aplikasi Sobat Banteng yang dimiliki TN Baluran untuk mengimplementasikan E-Ticketing merupakan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan dari Kerjasama Operasional antara Balai TN Baluran dengan PT. Asuransi Kita Bisa selaku penyedia layanan Asuransi bagi pengunjung wisata alam di TN Baluran. Dari sisi efisiensi pengguanaan sumber daya dalam pencapaian IKK ini, dengan tanpa alokasi anggaran khusus dan capaian tetap dapat terwujud maka dapat disimpulkan maka capaian ini sangat efisien.

Rekomendasi

1. Penguatan Infrastruktur dan Dukungan Teknologi Informasi. Dalam rangka menjamin keberlanjutan implementasi, diperlukan penguatan infrastruktur pendukung, khususnya ketersediaan jaringan internet, perangkat pembayaran digital, dan sistem cadangan (offline/backup). Upaya ini perlu dilaksanakan melalui sinergi dengan mitra perbankan, penyedia jasa telekomunikasi, dan pemerintah daerah.
2. Penguatan Integrasi Sistem dan Data Kinerja. Perlu mendorong integrasi sistem e-ticketing dengan sistem pengelolaan PNBP dan pelaporan kinerja agar data transaksi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengukuran kinerja secara real time.
3. Strategi Sosialisasi dan Edukasi kepada Pengunjung. Untuk meningkatkan tingkat adopsi sistem digital, diperlukan strategi sosialisasi yang berkelanjutan kepada pengunjung, termasuk penyediaan informasi yang jelas di pintu masuk kawasan, media digital, dan dukungan petugas layanan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai.
4. Penguatan Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko. Penerapan sistem digital perlu disertai dengan penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko, termasuk pengamanan data, pemantauan transaksi, serta evaluasi berkala terhadap potensi gangguan sistem dan risiko kebocoran PNBP.
5. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan. Balai Taman Nasional Baluran perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan e-ticketing dan cashless payment dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan inovasi layanan secara berkelanjutan.

IKK
Nilai Maturitas SPIP Balai Taman Nasional Baluran

3,90 Poin	4,06 Poin	104,10%
TARGET NILAI MATURITAS SPIP	CAPAIAN NILAI MATURITAS SPIP	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Balai Taman Nasional Baluran merupakan bagian integral dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Capaian IKK ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Capaian terhadap
Target Tahunan

Pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktorat Jenderal KSDAE dengan Kepala Balai TN Baluran untuk IKK Nilai Maturitas SPIP adalah 3,90 Poin. Dari target tersebut berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal diperoleh nilai sebesar 4,09 (104,10%)

Capaian IKK Pelaksanaan Maturitas SPIP di TN Baluran pada tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian di atas target tahunan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SPIP telah dilakukan secara lebih terstruktur melalui penguatan komitmen pimpinan, pembentukan dan penguatan Tim SPIP, serta penyusunan dan penyempurnaan dokumen manajemen risiko pada sebagian besar proses bisnis utama.

Namun demikian, pencapaian target tahunan belum sepenuhnya optimal. Beberapa unsur SPIP, khususnya pada aspek kegiatan pengendalian dan pemantauan, masih belum terlaksana secara konsisten dan terdokumentasi secara memadai. Keterbatasan sumber daya manusia dan fokus pelaksanaan tugas teknis lapangan turut mempengaruhi kecepatan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Capaian IKK Pelaksanaan Maturitas SPIP di Balai TN Baluran awal tahun periode Renstra 2025 – 2029 menunjukkan capaian target yang ditetapkan hingga akhir periode Renstra lima tahunan. Implementasi SPIP di TN Baluran telah bergerak dari pemenuhan aspek kepatuhan menuju penguatan efektivitas pengendalian intern, khususnya pada unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan SPIP telah berada pada jalur pencapaian target Renstra secara berkelanjutan.

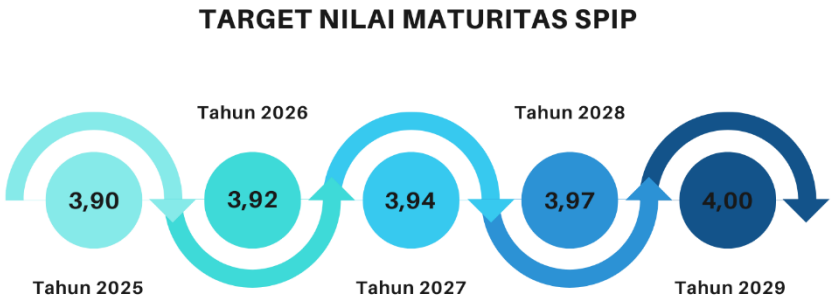

Gambar 43. Target Nilai Maturitas SPIP tahun 2025 - 2029

Dengan telah tercapainya target hingga akhir Renstra, capaian yang diraih saat ini memerlukan konsistensi pada beberapa unsur SPIP, terutama pada aspek pemantauan berkelanjutan dan penguatan peran manajemen dalam pengendalian intern. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kualitas penerapan SPIP agar target level maturitas yang ditetapkan pada akhir periode Renstra tetap tercapai secara optimal.

Analisis Capaian terhadap

Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2024, capaian IKK Nilai Maturitas SPIP di Balai TN Baluran menunjukkan kecenderungan peningkatan yang lebih baik dari 3,89 di 2024 menjadi 4,09 di tahun 2025. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh semakin kuatnya komitmen pimpinan dan meningkatnya pemahaman pegawai terhadap pentingnya penerapan SPIP sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi. Pada tahun berjalan, pelaksanaan pemetaan risiko dan pengendalian intern telah dilakukan secara lebih sistematis dan mencakup sebagian besar proses bisnis utama, dibandingkan tahun sebelumnya yang masih bersifat parsial.

Meskipun demikian, peningkatan capaian tersebut belum sepenuhnya optimal. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih ditemukan tantangan pada aspek konsistensi implementasi dan kualitas dokumentasi SPIP, khususnya dalam penguatan unsur kegiatan pengendalian dan pemantauan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan secara kuantitas dan cakupan penerapan SPIP, peningkatan kualitas dan integrasi pengendalian intern ke seluruh aktivitas organisasi masih perlu terus ditingkatkan agar target level maturitas yang ditetapkan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Benchmarking

Balai Besar KSDA Jawa Timur
4,29 Poin

Balai Taman Nasional Alas Purwo
4,29 Poin

Balai Taman Nasional Meru Betiri
3,92 Poin

Telah dilakukan Benchmarking/Studi Banding data capaian nilai Maturitas SPIP di 3 (tiga) UPT (Balai Besar KSDA Jawa Timur, Balai TN Alas Purwo dan Balai TN Meru Betiri. Secara umum capaian Nilai Maturitas SPIP Balai TN Baluran masih berada pada level yang cukup baik. Namun apabila dibandingkan dengan capaian dari Balai TN Alas Purwo, capaian Balai TN Baluran masih terpaut nilai sebesar 0,2 Poin. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam Balai TN Baluran melakukan upaya peningkatan kualitas Maturitas SPIP agar dalam diperoleh nilai yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Gambar 44. Rapat Pembahasan Pelaksanaan SPIP di Balai TN Baluran

Upaya dan Kendala

Upaya

Dalam rangka meningkatkan nilai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), TN Baluran telah melaksanakan berbagai upaya strategis dan operasional. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap penerapan SPIP, yang diwujudkan dengan penetapan kebijakan internal, pembentukan Tim SPIP, serta pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi SPIP kepada seluruh pegawai.

Selain itu, unit kerja secara bertahap melakukan pemetaan risiko (risk assessment) pada proses bisnis utama, menyusun dan menyempurnakan dokumen manajemen risiko, serta mengintegrasikan pengendalian intern ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Upaya peningkatan kualitas unsur SPIP juga dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan dari Inspektorat Jenderal, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SPIP tahun sebelumnya. Selanjutnya, TN Baluran berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi pendukung SPIP dan penguatan mekanisme monitoring serta evaluasi internal.

Kendala

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target IKK Maturitas SPIP masih menghadapi beberapa kendala. Kendala utama antara lain belum meratanya pemahaman dan kompetensi SDM terkait konsep dan implementasi SPIP, khususnya pada aspek manajemen risiko dan pengendalian kegiatan. Hal ini berdampak pada kualitas penyusunan dokumen SPIP yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria maturitas yang diharapkan.

Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai dan tingginya beban tugas teknis lapangan menyebabkan pelaksanaan SPIP belum optimal dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses bisnis. Kendala lainnya adalah masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana pendukung, termasuk sistem informasi yang terintegrasi, serta belum optimalnya konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala. Kondisi tersebut mempengaruhi kecepatan dan kualitas peningkatan level maturitas SPIP di TN Baluran.

Outcome

Peningkatan pelaksanaan Maturitas SPIP di Balai TN Baluran menghasilkan terwujudnya sistem pengendalian intern yang semakin efektif dan terintegrasi dalam seluruh proses bisnis organisasi. Hal ini tercermin dari meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan risiko yang lebih terstruktur, serta berkurangnya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Selain itu, pelaksanaan SPIP mendorong meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabilitas kinerja, dan transparansi pengelolaan sumber daya. Outcome tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) di Balai TN Baluran serta mendukung pencapaian sasaran strategis dan nilai akuntabilitas kinerja instansi secara berkelanjutan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Pencapaian Nilai Maturitas SPIP

Secara khusus IKK ini tidak didukung melalui alokasi pendanaan yang tersedia dalam DIPA Balai TN Baluran di tahun anggaran 2025. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian IKK ini dapat terlaksana dengan sangat efisien.

Rekomendasi

1. Memperkuat komitmen pimpinan dalam penerapan SPIP melalui integrasi pengendalian intern dan manajemen risiko ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan pendampingan berkelanjutan terkait SPIP dan manajemen risiko, khususnya bagi Tim SPIP dan penanggung jawab kegiatan.
3. Menyempurnakan dokumen SPIP secara berkala agar selaras dengan proses bisnis dan dinamika risiko aktual di TN Baluran.
4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi internal serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SPIP dan pengawasan internal.
5. Memanfaatkan sistem informasi pendukung SPIP untuk meningkatkan konsistensi, keterlacakan, dan efektivitas pengendalian intern.

IKK
Nilai SAKIP Balai Taman Nasional Baluran

89,13 Poin	89,15 Poin	100,02%
TARGET NILAI SAKIP BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN	CAPAIAN NILAI SAKIP BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN	CAPAIAN TERHADAP TARGET 2025

Nilai SAKIP Balai Taman Nasional Baluran menjadi salah satu hal penting yang mencerminkan keberhasilan dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkup Balai TN Baluran. Sebagai salah satu hal yang diukur dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, nilai SAKIP ini mencerminkan komitmen kuat Balai TN Baluran dalam memastikan akuntabilitas kinerja yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun 2023, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan melalui mekanisme berjenjang, mulai dari unit kerja tingkat paling kecil hingga tingkat tertinggi. Proses evaluasi ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

1. Penilaian Mandiri (PM): Dilakukan oleh masing-masing entitas kerja dengan fokus pada aspek keberadaan, kualitas, dan manfaat dari setiap komponen SAKIP.
2. Supervisi dan Penjaminan Kualitas: Penilaian mandiri yang dilakukan unit kerja dijamin kualitasnya oleh entitas di atasnya untuk memastikan akurasi dan integritas data.
3. Evaluasi Terpadu: Mengintegrasikan hasil penilaian dari semua unit kerja untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat akuntabilitas kinerja.

Balai TN Baluran berhasil meraih nilai 89,15 dengan predikat "A". Predikat ini menggambarkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di Balai TN Baluran telah mencapai tingkat "Memuaskan". Predikat "Memuaskan" tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, tetapi juga menegaskan posisi Balai TN Baluran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi hasil (outcome-based governance). Dengan pencapaian ini, Balai TN Baluran telah berkontribusi secara signifikan dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkup Ditjen KSDAE, serta memperkuat fondasi untuk pencapaian target dan sasaran strategis yang lebih baik di masa mendatang.

Analisis Capaian terhadap

Target Tahunan

Target Nilai Sakip Balai TN Baluran yang diperjanjikan untuk tahun 2025 ialah sebesar 89,13 poin. Target tersebut ditentukan menyesuaikan dengan target Nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2025. Nilai SAKIP Balai TN Baluran di tahun 2025 mencapai 100,02% terhadap target. Hasil penilaian SAKIP per komponen dapat dilihat pada tabel 8.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025	Capaian Terhadap Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30	27,32	91,07%
2	Pengukuran Kinerja	30	26,99	89,97%
3	Pelaporan Kinerja	15	13,59	90,60%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,25	85%
Nilai Akhir Evaluasi		**100**	**89,15**	

Gambar 45. Evaluasi Dalam Rangka Pencapaian Target Kegiatan

Dari hasil PM tersebut dapat dilihat bahwa komponen SAKIP dengan persentase terhadap bobot paling tinggi ada pada komponen Perencanaan Kinerja dan paling rendah pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di Balai TN Baluran harus lebih ditingkatkan.

Gambar 46. Evaluasi Dalam Rangka Pencapaian Target Kegiatan

Analisis Capaian terhadap

Target Lima Tahunan (RENSTRA)

Pada periode awal Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Balai TN Baluran berhasil melampaui target Nilai SAKIP dengan capaian mencapai 89,15 poin atau 100,02% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Balai TN Baluran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan arah kebijakan strategis. Capaian diawal periode Renstra ini mencerminkan komitmen dalam pelaksanaan perbaikan tata kelola yang berorientasi pada hasil. Namun demikian, meskipun capaian ini sudah berada pada kategori "Memuaskan (Predikat A)" Balai TN Baluran belum mencapai kategori "Sangat Memuaskan (Predikat AA)" yang menjadi aspirasi akhir dalam implementasi SAKIP. Hal ini mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut, baik dalam kualitas pelaksanaan maupun penguatan sistem penunjang akuntabilitas. Untuk mencapai level tertinggi ini, langkah strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan evaluasi serta optimalisasi mekanisme dialog kinerja.

Keberhasilan melampaui target pada awal periode 2025-2029 menjadi fondasi yang kuat bagi Balai TN Baluran untuk melanjutkan perjalanan menuju tata kelola kinerja yang semakin baik. Dengan upaya berkelanjutan dalam memperkuat akuntabilitas dan efisiensi, Balai TN Baluran dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara menyeluruh.

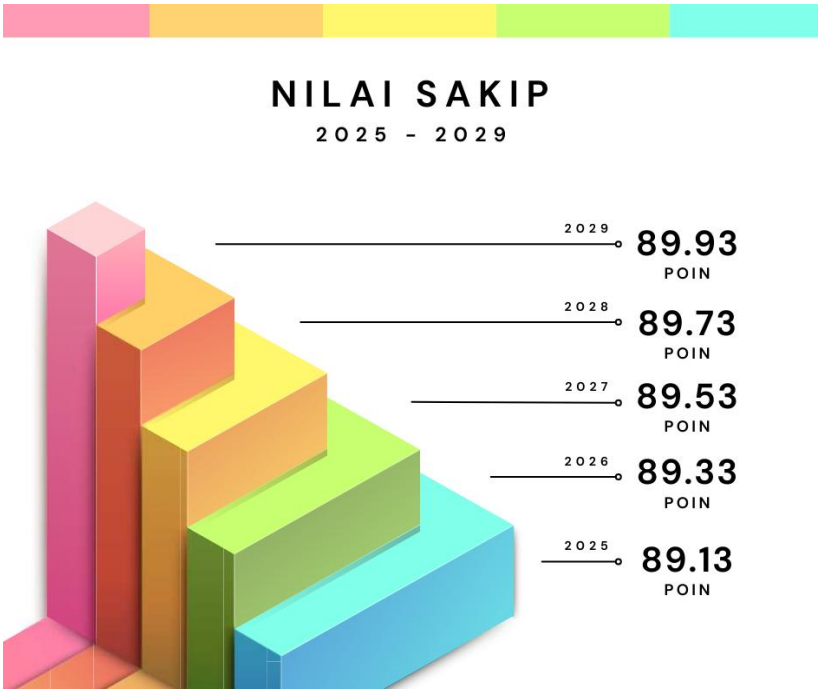

Gambar 47. Grafik target Nilai SAKIP tahun 2025 - 2029

Analisis Capaian terhadap

Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian nilai SAKIP Balai TN Baluran hanya meningkat sebanyak 0,02 poin (YoY). Pada tabel 10, dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja mengalami perubahan di semua komponen, meskipun ada yang mengalami kenaikan dan ada yang meningkat. Peningkatan capaian ini secara signifikan terdapat pada komponen Pelaporan Kinerja. Sedangkan komponen Perencanaan Kinerja mengalami penurunan. Komponen yang cenderung stagnan tidak mengalami peningkatan yang signifikan ialah komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mendongkrak pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Perencanaan Kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 6. Grafik target Nilai SAKIP tahun 2025 - 2029

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai 2024	Nilai 2025	
1	Perencanaan Kinerja	27,45	27,32	**Turun**
2	Pengukuran Kinerja	26,97	26,99	**Naik**
3	Pelaporan Kinerja	13,46	13,59	**Naik**
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	21,25	21,25	**Stagnan**
Nilai Akhir Evaluasi		**89,13**	**89,15**	

Benchmarking

Balai TN Gunung Merbabu
Nilai SAKIP 95,73

Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango
Nilai SAKIP 92,76

Balai TN Meru Betiri
Nilai SAKIP 92,48

Meskipun Balai TN Baluran telah berada pada predikat A “Memuaskan,” masih terdapat peluang untuk meningkatkan implementasi SAKIP hingga mencapai Predikat AA “Sangat Memuaskan”, seperti yang diraih antara lain oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Balai Taman Nasional Meru Betiri, sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih unggul dan berorientasi pada hasil.

Upaya dan Kendala

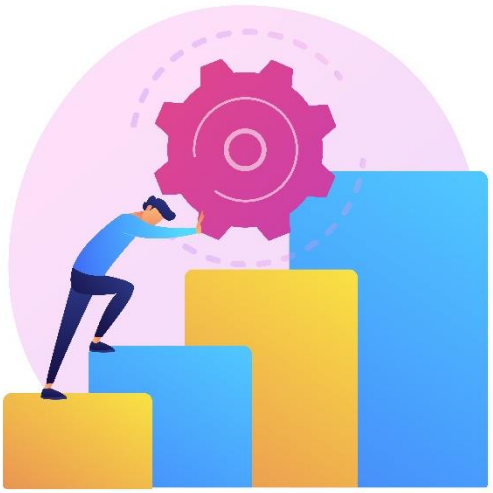

Pada tahun 2025, Balai TN Baluran telah melaksanakan beberapa upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Pencapaian Nilai SAKIP yang melebihi target merupakan bukti dari langkah-langkah yang telah dilakukan, seperti (1) pembentukan tim pengelola kinerja untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP dan Kinerja Anggaran, (2) melaksanakan pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi berkala, (3) melaksanakan dan mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SAKIP sebagai salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-SAKIP dan (4) melaksanakan seluruh proses pengelolaan kinerja secara maksimal sesuai dengan Pedoman Pengeloaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kehutanan.

Dalam melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain (1) belum optimalnya pelaksanaan pengukuran kinerja berkala, (2) hasil pemantauan dan evaluasi kinerja tidak secara langsung dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan, dan (3) kapasitas sumber daya manusia Balai Taman Nasional Baluran yang belum maksimal untuk melakukan perencanaan dan evaluasi.

Outcome

Akuntabilitas kinerja yang memuaskan di tingkat satuan kerja, seperti Balai TN Baluran, memiliki dampak strategis dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pada level yang lebih tinggi, seperti Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem secara keseluruhan. Ketika akuntabilitas kinerja meningkat berdampak dalam memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian. Dengan demikian, keberhasilan akuntabilitas kinerja di tingkat Balai TN Baluran memberikan efek domino yang memperkuat tata kelola kelembagaan secara keseluruhan, mendukung upaya perbaikan layanan publik, serta mempercepat transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih baik.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam

Pencapaian Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen untuk memastikan organisasi dapat mencapai hasil optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Salah satu sumber daya utama yang dapat diukur adalah anggaran, seperti yang dialokasikan pada Balai TN Baluran, melalui RO Layanan Perkantoran. Pada tahun 2025, pagu anggaran untuk RO tersebut ditetapkan sebesar Rp 11.537.006.000,-. Efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kepuasan layanan perkantoran diukur dengan membandingkan realisasi anggaran RO tersebut terhadap capaian kinerja nilai SAKIP Balai Taman Nasional Baluran. Realisasi anggaran RO Layanan Perkantoran pada tahun 2025 mencapai Rp 11.529.098.875,-, atau sekitar 99,99% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, capaian kinerja Nilai SAKIP Balai TN Baluran pada tahun yang sama tercatat sebesar 100,02%.

Berdasarkan perhitungan efisiensi, nilai yang diperoleh adalah 0,9, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai SAKIP Balai TN Baluran cukup efisien. Efisiensi penggunaan anggaran tidak hanya terlihat dari realisasi yang hampir mencapai 100% dari pagu, tetapi juga dari capaian kinerja yang melampaui target. Hal ini mencerminkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan telah memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian implementasi SAKIP di internal Balai TN Baluran. Keberhasilan ini merupakan hasil dari penerapan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel. Melalui mekanisme perencanaan yang matang dan berbasis data mampu mengidentifikasi prioritas pengeluaran yang benar-benar mendukung target.

Gambar 48. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan lingkup Balai Taman Nasional Baluran

Rekomendasi

Peningkatan Nilai SAKIP merupakan salah satu prioritas strategis Balai TN Baluran untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Evaluasi SAKIP tidak hanya menjadi alat ukur capaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi area perbaikan, khususnya dalam efektivitas perencanaan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Walaupun capaian nilai SAKIP saat ini telah memenuhi target, Balai TN Baluran menyadari adanya ruang untuk perbaikan demi memaksimalkan kualitas akuntabilitas kinerja secara menyeluruh.

Untuk mencapai peningkatan nilai SAKIP yang lebih optimal beberapa rekomendasi perbaikan telah dirumuskan:

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Upaya ini melibatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi khusus di bidang perencanaan dan evaluasi kinerja. SDM yang terampil dan memahami prinsip-prinsip SAKIP akan memperkuat kemampuan Balai Taman Nasional Baluran dalam menyusun rencana strategis yang lebih efektif dan mengintegrasikan pendekatan akuntabilitas ke dalam setiap proses kerja.

Optimalisasi Dialog Kinerja Berkala

Pelaksanaan dialog kinerja secara berkala di lingkup Balai TN Baluran menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi efektif antarbagian. Proses ini memungkinkan adanya pertukaran feedback konstruktif, identifikasi hambatan operasional, dan penyesuaian langkah strategis berdasarkan kebutuhan aktual.

Benchmarking dan Studi Banding

Benchmarking ke kementerian/lembaga lain atau pemerintah daerah yang telah berhasil meningkatkan nilai SAKIP menjadi langkah penting untuk belajar dari praktik terbaik (best practices). Studi ini memberikan wawasan baru tentang inovasi dalam implementasi SAKIP, baik dari segi kebijakan, pendekatan teknis, maupun tata kelola.

Gambar 49. Pembinaan Pegawai Melalui Upacara Peringatan Hari Besar Nasional

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN

Realisasi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) dan peningkatan kinerja organisasi. Pelaksanaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Realisasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat dicapai dengan tingkat serapan anggaran yang proporsional. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran telah dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan keluaran dan hasil yang optimal. Efisiensi juga didukung oleh penerapan pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal.

Efisiensi penggunaan anggaran di Balai Taman Nasional Baluran dihitung dengan membandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2025. Realisasi anggaran Balai TN Baluran Tahun 2025 sebesar 99,77% dan Capaian kinerja Balai TN Baluran Tahun 2025 sebesar 122,51% Rumus menghitung efisiensi kinerja yaitu % realisasi anggaran : % capaian kinerja

Hasil perhitungan efisiensi penggunaan anggaran Balai TN Baluran pada tahun 2025 ialah senilai 0,81. Nilai tersebut menunjukkan bahwa telah efisiensinya penggunaan anggaran Balai TN Baluran untuk mencapai target-target kinerja. Efisiensi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan dengan beberapa strategi seperti pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, penyusunan anggaran yang akrual, prioritas kegiatan, peningkatan proses operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta fokus pencapaian target kinerja.

Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Pengukuran kinerja anggaran dilakukan dengan membandingkan antara tingkat realisasi anggaran dan capaian output serta outcome kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Taman Nasional Baluran mengelola pagu anggaran yang telah disesuaikan melalui beberapa kali revisi anggaran. Realisasi anggaran menunjukkan tingkat penyerapan yang baik dan selaras dengan capaian indikator kinerja kegiatan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah diarahkan secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Pada awal tahun 2025 Anggaran Belanja Kegiatan Balai TN Baluran sebesar Rp11.117.943.000,- yang terdiri dari hanya Layanan Perkantoran. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada akhir tahun 2024 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran, khususnya pada tahap awal tahun berjalan. Perubahan struktur kelembagaan memerlukan penyesuaian perencanaan, nomenklatur program/kegiatan, serta tata kelola anggaran, yang berimplikasi pada perlambatan awal pelaksanaan dan serapan anggaran. Hingga akhir tahun 2025 anggaran belanja kegiatan Balai TN Baluran menjadi sebesar Rp. 14.804.452.000,- yang terdiri dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp. 11.819.250.000,- dan Program Dukunga Menejemen sebesar Rp. 2.985.202.000,-

Analisis Nilai Kinerja Anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat direalisasikan dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Tidak terdapat deviasi signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta tidak terdapat kegiatan strategis yang tertunda akibat keterbatasan dukungan anggaran. Dengan demikian, kinerja anggaran Balai Taman Nasional Baluran Tahun 2025 berada pada kategori **baik** dan mendukung terwujudnya prinsip value for money.

Nilai Kinerja Anggaran ini mencerminkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kinerja, serta menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya guna mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Taman Nasional Baluran.

CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Dalam konteks pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025, Balai TN Baluran memegang amanat pada 2 (dua) Prioritas Nasional (PN), meliputi: 1) PN 2 tentang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.; dan 2) PN 6 tentang membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Kontribusi Balai TN Baluran pada Prioritas Nasional 2 terwujud melalui Sasaran Program 1 dan 3 Ditjen KSDAE yaitu :

Sasaran Program 1:
Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan dan keanekaragaman hayati.
Aksi nyata Balai TN Baluran untuk Sasaran Program 1 :

1. Melaksanakan penelitian dan monitoring intensif terhadap spesies prioritas seperti Macan Tutul (*Panthera pardus*) untuk asesmen status keterancaman IUCN Red List.
2. Melakukan upaya konservasi ex-situ dan in-situ terpadu (pemulihan ekosistem, Suaka Satwa Banteng, Reintroduksi Babi Kutil).
3. Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi (aplikasi jejak Banteng) dalam penerapan SMART PATROL untuk mencegah tindak pidana kehutanan (perambahan, kebakaran, perburuan liar).

Sasaran Program 3:
Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
Aksi nyata Balai TN Baluran untuk Sasaran Program 3 :

1. Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pendataan potensi bioprospecting (misalnya, tumbuhan obat tradisional).
2. Meningkatkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari e-ticketing dan retribusi jasa lainnya melalui pengelolaan yang profesional.
3. Meningkatkan kualitas layanan wisata berbasis satwa liar dan pengembangan wisata minat khusus.

CAPAIAN PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS)

Balai Taman Nasional Baluran secara konsisten mengarusutamakan prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan selama Tahun 2025. Pengarusutamaan SDGs dilaksanakan melalui integrasi sasaran pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan kinerja, pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, serta penguatan peran multipihak dalam mendukung keseimbangan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kontribusi utama Balai TN Baluran terhadap pencapaian SDGs tercermin pada Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan) melalui upaya perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan pengelolaan kawasan secara efektif dan berkelanjutan. Pelaksanaan patroli kawasan, rehabilitasi habitat, serta monitoring ekosistem menjadi bagian integral dalam menjaga fungsi ekologis kawasan TN Baluran.

Selain itu, Balai TN Baluran turut mendukung Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pengembangan wisata alam berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan, serta fasilitasi kemitraan konservasi. Kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi lokal yang selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan.

Dalam aspek tata kelola, penerapan prinsip Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) diwujudkan melalui penguatan akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan anggaran, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat juga mencerminkan dukungan terhadap Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Secara keseluruhan, capaian pengarusutamaan SDGs pada Balai TN Baluran Tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan global, khususnya melalui pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya alam. Narasi ini menjadi landasan dalam memperkuat integrasi SDGs pada pelaksanaan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

BAB IV
PENUTUP

Simpulan Umum Capaian Kinerja

Pelaksanaan kinerja Balai TN Baluran Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan terkendali, sebagaimana tercermin dari tingkat pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan kualitas tata kelola, serta pelayanan publik.

Peningkatan kinerja terlihat pada aspek efektivitas pengelolaan kawasan, penguatan perencanaan dan pengendalian, serta optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berdampak pada kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, upaya penguatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan pemangku kepentingan turut berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Balai TN Baluran dan selaras dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target Renstra, sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam upaya peningkatan kinerja berkelanjutan pada periode perencanaan berikutnya.

Permasalahan dan Langkah ke Depan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Balai TN Baluran masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran, tantangan dalam pengendalian gangguan keamanan kawasan, serta kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan. Selain itu, dinamika perubahan kondisi lingkungan dan meningkatnya tekanan pemanfaatan kawasan juga menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja.

Sebagai langkah ke depan, Balai TN Baluran akan melakukan penguatan perencanaan berbasis kinerja melalui penajaman indikator dan target, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kawasan dan pelayanan publik. Upaya peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra strategis akan terus diperkuat guna mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Selain itu, Balai TN Baluran akan mendorong inovasi pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan, termasuk pengembangan wisata alam yang berwawasan konservasi, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus kontribusi terhadap PNBP. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2026 dan periode Renstra selanjutnya.

LAMPIRAN